

LAPORAN KINERJA TA 2023

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI



KATA PENGANTAR



“...Sekretariat Inspektorat Jenderal senantiasa mendukung kegiatan pengawasan agar dapat berorientasi hasil dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Kemenlu serta menjadi mitra strategis bagi organisasi...”

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Inspektorat Jenderal (Set.Itjen) Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja berbasis anggaran yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

LKj Set.Itjen Tahun 2023 mengacu kepada PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenlu No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut, LKj Set.Itjen Tahun 2023 menyajikan informasi tentang pengelolaan kinerja yang meliputi aspek perencanaan dan analisis keberhasilan pencapaian kinerja, berikut kendala yang dihadapi dan solusinya, serta langkah proyeksi ke depan.

“... Sesuai visi dan misi Set.Itjen dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 yaitu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang baik, Set.Itjen terus melakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)...”

Sejumlah program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai visi dan misi Set.Itjen terutama dalam rangka peningkatan infrastruktur APIP, antara lain:

- ✓ Peningkatan dukungan kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) Kementerian Luar Negeri melalui fasilitasi penyusunan pedoman dan peraturan di bidang

- pengawasan Inspektorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat) bagi APIP Kemenlu, serta koordinasi penyempurnaan struktur organisasi Itjen.
- ✓ Pengawasan dalam kerangka penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri melalui pemantauan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2023, satu unit kerja berhasil mendapatkan penghargaan ZI WBK yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, dan satu unit kerja berhasil meraih ZI WBBM yaitu Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia.
 - ✓ Koordinasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Keberhasilan Set.Itjen dalam merealisasikan rencana kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam PK Tahun 2023 ditandai dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) predikat "ISTIMEWA". Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama dan kontribusi signifikan dari seluruh jajaran dan komponen organisasi di Set.Itjen sepanjang tahun 2023.

Akhir kata, LKj Set.Itjen Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan tolok ukur peningkatan kinerja Set.Itjen di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2024



Azis Nurwahyudi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR INFOGRAFIS	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	10
BAB I PENDAHULUAN	15
I.1. Latar Belakang	15
I.2. Aspek Strategis Organisasi	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
II.1. Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024.....	19
II.2. Peta Strategi.....	21
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	26
Analisis IKU S1.1. Nilai RB pada Komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	28
Analisis IKU S1.2. Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	39
CUSTOMER PERSPECTIVE.....	50
Analisis IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	51
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	56
Analisis IKU B1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu	57
Analisis IKU B2.1. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	65
Analisis IKU B3.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	72
Analisis IKU B4.1 Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP	78
Analisis IKU B4.2 Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal	86
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE.....	91
Analisis IKU L1.1. Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	92
III.2 Realisasi Anggaran	103
III.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	104
BAB V Penutup.....	109
LAMPIRAN	111

DAFTAR INFOGRAFIS

Infografis 1 Ringkasan Eksekutif LKj Set.Itjen TA 2023.....	9
Infografis 2 <i>Highlights</i> Kinerja Set.Itjen 2023	12
Infografis 3 Fungsi Set.Itjen (Permenlu 6/2021)	16
Infografis 4 Visi dan Misi Set.Itjen 2020 - 2024	19
Infografis 5 Inovasi Perwakilan RI Penerima WBK 2023.....	32
Infografis 6 Inovasi Unit Kerja Penerima WBBM 2023.....	33
Infografis 7 Data pengaduan yang terselesaikan Tahun 2023	34
Infografis 8 Perbandingan Laporan Pengelolaan Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2022 dan 2023	35
Infografis 9 Catatan Positif dalam Hasil Evaluasi AKIP Itjen	41
Infografis 10 Impresi Positif Hasil Survei Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan oleh Set.Itjen ..	52
Infografis 11 Parameter Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset	58
Infografis 12 Komponen Indikator Anggaran	65
Infografis 13 Komponen Layanan Administrasi dan Teknis di Itjen	86
Infografis 14 Catatan Positif Hasil Evaluasi AKIP Set.Itjen	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skor Perspektif BSC Kinerja Set.Itjen 2023	11
Tabel 2 Skor Perspektif BSC Kinerja Set.Itjen 2023	11
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal TA 2023.....	22
Tabel 4 Program dan Kegiatan Anggaran Set.Itjen TA 2023	22
Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Set.Itjen TA 2023	25
Tabel 6 Matriks NCKO Triwulan Set.Itjen	26
Tabel 7 Capaian kinerja IKU S1.1.....	29
Tabel 8 Komponen Penilaian Nilai RB Kemenlu.....	29
Tabel 9 Perbandingan Capaian IKU S1.1 Tahun 2022-2023.....	30
Tabel 10 Perbandingan Perolehan Predikat WBK/WBBM Tahun 2019-2023.....	33
Tabel 11 Klasifikasi Nilai AKIP	39
Tabel 12 Capaian Kinerja IKU S1.2.....	40
Tabel 13 Komponen Penilaian AKIP Itjen	40
Tabel 14 Perbandingan Capaian IKU S1.2 Tahun 2020-2023	42
Tabel 15 Tingkat <i>on the track</i> Target Renstra dengan Realisasi 2023	42
Tabel 16 Tindak Lanjut Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Itjen	45
Tabel 17 Katagori dan skala likert survei persepsi kepuasan layanan pengawasan	51
Tabel 18 Capaian Kinerja IKU C1.1.....	52
Tabel 19 Perbandingan Capaian IKU C1.1 Tahun 2022-2023.....	53
Tabel 20 Katagori dan skala likert Indeks Pengelolaan Aset.....	58
Tabel 21 Capaian Kinerja IKU B1.1	59
Tabel 22 Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2022-2023.....	60
Tabel 23 Capaian IKU B2.1	66
Tabel 24 Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023.....	67
Tabel 25 Capaian IKU B3.1	72
Tabel 26 Perbandingan IKU B3.1 Tahun 2022-2023	73
Tabel 27 Capaian IKU B4.1	79
Tabel 28 Perbandingan IKU B4.1 Tahun 2022-2023	79
Tabel 29 Capaian IKU B4.2	87
Tabel 30 Perbandingan IKU B4.1 Tahun 2022-2023	87

Tabel 31 Klasifikasi Nilai AKIP	92
Tabel 32 Capaian Kinerja IKU L1.1	93
Tabel 33 Komponen Nilai AKIP Set.Itjen.....	94
Tabel 34 Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023	96
Tabel 35 Tingkat on the track Target Renstra dengan Realisasi 2023 IKU L1.1	96
Tabel 36 Proyeksi Target 2024 IKU L1.1	97
Tabel 37 Tindak Lanjut Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Set.Itjen	101
Tabel 38 Pagu dan Realisasi Anggaran per jenis belanja Tahun 2023	103
Tabel 39 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023.....	103
Tabel 40 Data Realisasi Anggaran Per Rincian Output (RO)	104
Tabel 41 Data Pegawai Set.Itjen berdasarkan Formasi dan Bezetting Tahun 2023	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Persentase Pencapaian IKU Set.Itjen Tahun 2023	10
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	17
Gambar 3 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2023	21
Gambar 4 Perbandingan NCKO Set.Itjen TA 2023 dan 2022	25
Gambar 5 Penilaian Monev Gratifikasi Tahun 2023	36
Gambar 6 Perbandingan bobot perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2022 dan 2023	66



Ringkasan Eksekutif

CAPAIAN KINERJA 2023

Ringkasan Eksekutif

Nilai Capaian Kinerja Organisasi

103,26

Predikat
ISTIMEWA

8/9 IKU

Memenuhi target
≥100%

1/9 IKU

Hampir
memenuhi
target (80 - 99)

Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran

Rp

Realisasi anggaran

Rp

Anggaran terserap

100%

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Visi

Menjadi Penggerak Utama dalam Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal TA 2023: 4 Perspektif, 7 Sasaran Strategis (SS), dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Stakeholders Perspective

BOBOT 25%

Nilai perspektif **98,17**

IKU S1.1: Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Target: 8,85 Realisasi: 8,51 **96,16%**

IKU S1.2: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Target: 80,01 (A) Realisasi: 80,15 (A) **100,17%**

Customer Perspective

BOBOT 15%

Nilai perspektif **115,67**

IKU C1.1: Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Setitjen Target: 3 (skala 4) Realisasi: 3,47 **115,67%**

Internal Business Process Perspective

BOBOT 30%

Nilai perspektif **104,30**

IKU B1.1: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemlu Target: 2,90 dari 4 Realisasi: 2,91 **100,34%**

IKU B2.1: Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Target: 93 Realisasi: 94,48 **101,98%**

IKU B3.1: Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Target: 95% Realisasi: 95,57% **100,60%**

IKU B4.1: Indeks dukungan peningkatan kapabilitas APIP Target: 3,50 (skala 4) Realisasi: 4 **114,29%**

IKU B4.2: Indeks pemenuhan layanan administrasi dan teknis di Inspektorat Jenderal Target: 3,50 (skala 4) Realisasi: 4 **114,29%**

Learning and Growth Perspective

BOBOT 30%

Nilai perspektif **100,25**

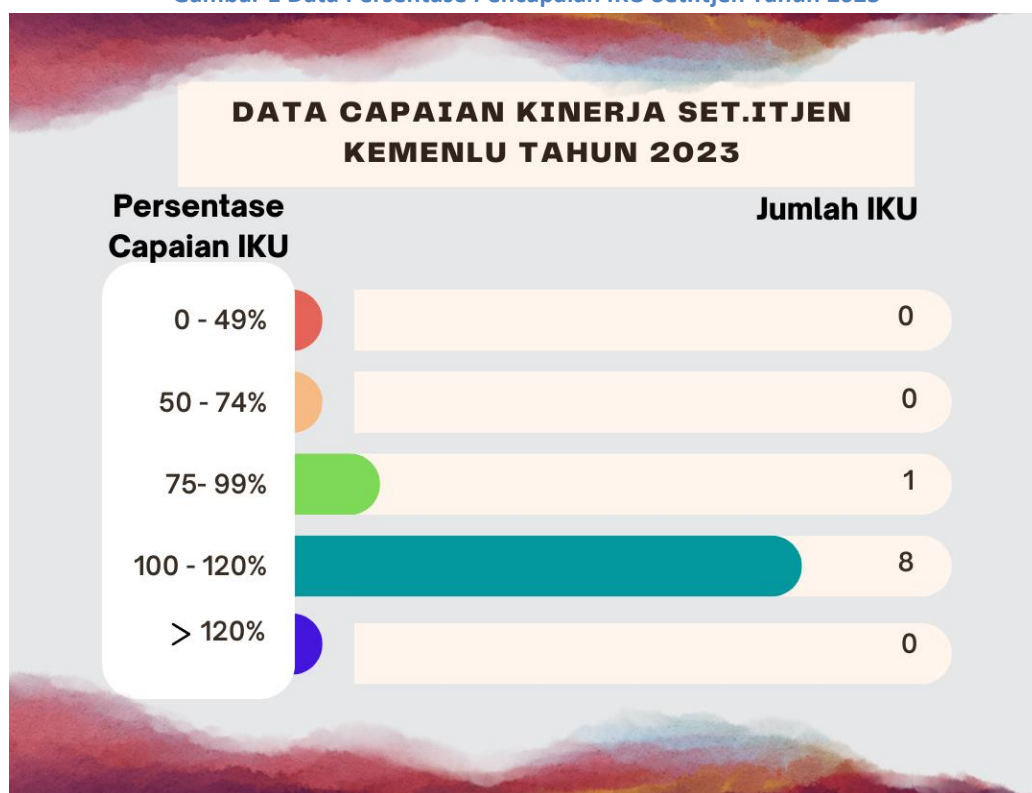
IKU L1.1: Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Target: 79,70 (BB) Realisasi: 79,90 (BB) **100,25%**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini menyajikan informasi kinerja selama tahun 2023 untuk setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta informasi terkait efisiensi penggunaan anggaran, kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sesuai visi dan misi Sekretariat Inspektorat Jenderal (Set.Itjen) Tahun 2020-2024, yaitu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang baik.

Set.Itjen menerapkan manajemen kinerja berdasarkan Balance Score Card (BSC) dengan PK Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2023 memiliki 7 Sasaran Strategis (SS) dengan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja pada sebagian besar IKU Set.Itjen tahun 2023, telah mencapai target yang ditetapkan pada PK Ses.Itjen TA 2023. Dari 9 IKU yang terdapat dalam 7 Sasaran Strategis pada Peta Strategi Set.Itjen, 8 IKU mencapai nilai kinerja 100 – 120% dan 1 IKU nilai capaian kinerjanya diantara 75 - 99%, serta tidak terdapat IKU yang nilai capaian kinerjanya melampaui batas toleransi 120%.

Gambar 1 Data Persentase Pencapaian IKU Set.Itjen Tahun 2023



Sementara untuk realisasi anggaran, dengan alokasi pagu anggaran awal sebesar

yang kemudian dengan adanya 2 (dua) kali ABT BBO dan BBNO dengan total sebesar

, alokasi pagu anggaran akhir meningkat menjadi

Dari alokasi pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023 mencapai

atau mencapai hingga 100%.

Berdasarkan hasil realisasi IKU, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Set.Itjen Tahun 2023 sebesar **103,26** dengan predikat **"ISTIMEWA"**. NCKO merupakan perhitungan akumulasi dari capaian setiap perspektif berdasarkan bobot masing-masing. Perhitungan NCKO dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja 2.0 (AKSI) dengan merujuk pada Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Kemenlu dan Perwakilan RI. Rincian NCKO sebagai berikut:

Tabel 1 Skor Perspektif BSC Kinerja Set.Itjen 2023

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Stakeholder Perspective</i>	25%	98,17
<i>Customer Perspective</i>	15%	115,67
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	104,30
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	100,25
Total NCKO 2023	103,26	

Tabel 2 Skor Perspektif BSC Kinerja Set.Itjen 2023

Set.Itjen	2020	2021	2022	2023
<i>Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)</i>	100,41 *Melebihi espektasi	99,51 ↓ *Baik	104,51 ↑ *Istimewa	103,26 ↓ *Istimewa

Nilai NCKO Set.Itjen tahun 2023 berhasil mencapai predikat istimewa seperti tahun sebelumnya meskipun terdapat penurunan nilai dari 104,51 menjadi 103,26. Namun demikian, **NCKO Set.Itjen**

2023 diperoleh dari perbandingan realisasi kinerja dengan target yang lebih tinggi dari tahun 2022. Dengan demikian, NCKO Set.Itjen secara umum terus mengalami perbaikan sejak tahun 2020 yang tercatat sebesar 100,41 (melebihi espektasi) walau sempat terjadi penurunan ke 99,51 (baik) pada tahun 2021.

Keberhasilan Set.itjen dalam mencapai target kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh upaya pembenahan dan penguatan tugas Set.Itjen dalam melaksanakan layanan manajemen dan teknis lainnya, serta koordinasi pelaksanaan tugas substansi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam kaitan tersebut, evaluasi internal dilakukan untuk menganalisis berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas implelementasi AKIP Set.Itjen di tahun sebelumnya.

Infografis 2 Highlights Kinerja Set.Itjen 2023



Untuk proyeksi ke depan, Set.Itjen akan terus memperkuat koordinasi dalam mendukung tata kelola Itjen yang baik, khususnya terkait dukungan peningkatan kapabilitas APIP/IACM diantaranya mencakup fasilitasi penyusunan peraturan/pedoman pengawasan, seperti penetapan revisi Peraturan Menteri Luar Negeri terkait pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, pelaksanaan bimtek utamanya terkait pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas APIP, serta mendukung peningkatan jumlah unit kerja di Kemenlu dan Perwakilan RI yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Selain itu, Set.Itjen juga akan memperkuat layanan pengawasan Itjen berbasis TIK serta melanjutkan inisiasi dan koordinasi terhadap modernisasi pengawasan Itjen guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengawasan yang lebih memadai.

—-00—



Bab I

Pendahuluan

Penjabaran arti penting dan eksistensi Set.Itjen dalam mendukung pencapaian visi-misi Kemenlu dan visi-misi Itjen sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai bagian integral dari Unit Kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal (Set.Itjen) turut berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Perwakilan RI.

Set.Itjen dituntut untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melakukan penyesuaian dan adaptasi sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi.

Hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusi Set.Itjen dalam mendukung tugas pengawasan di Kemenlu dan Perwakilan RI yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.



Berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Set. Itjen mempunyai tugas melaksanakan layanan manajemen dan teknis lainnya, serta koordinasi pelaksanaan tugas substansi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Set.Itjen menjalankan fungsi berdasarkan Permenlu No. 6 Tahun 2021 meliputi:

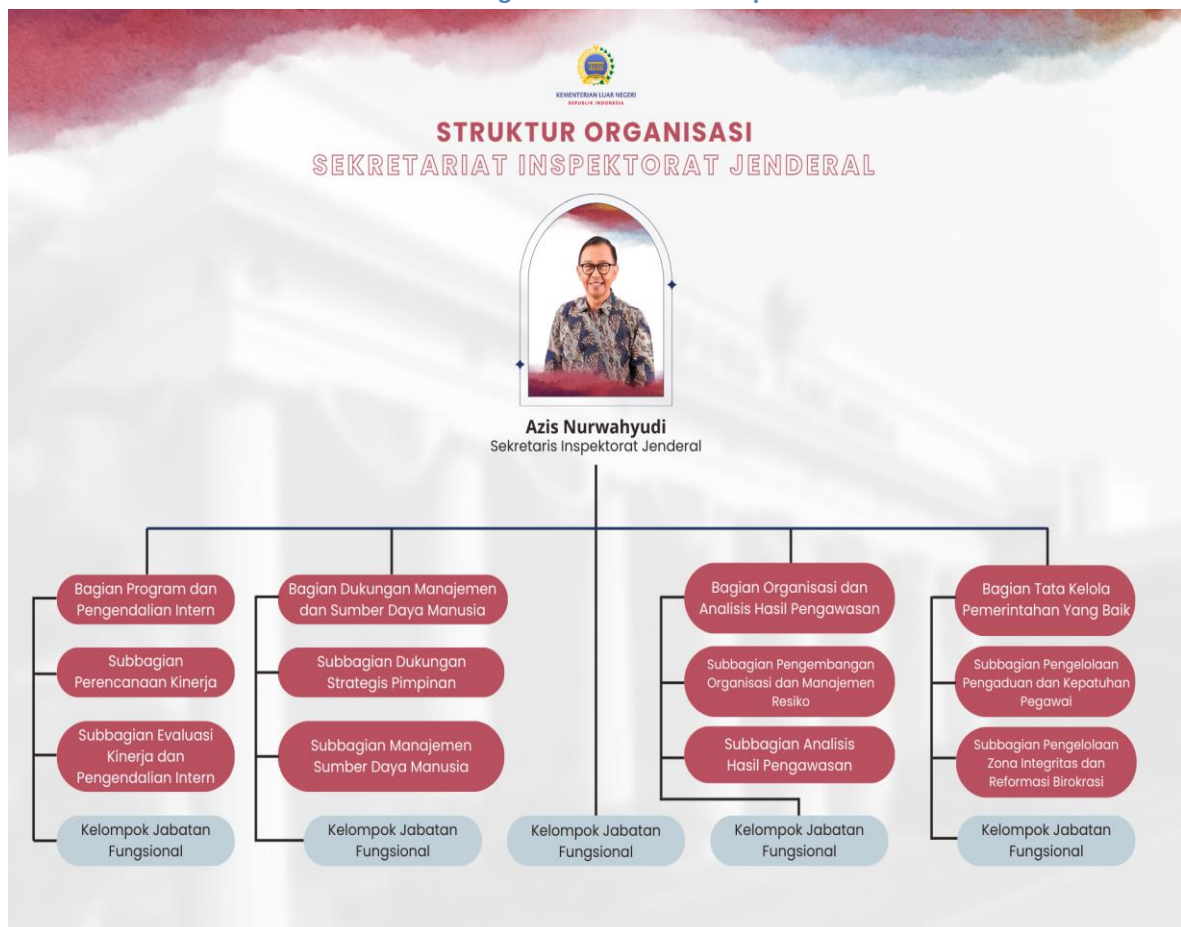
Infografis 3 Fungsi Set.Itjen (Permenlu 6/2021)



Berdasarkan Permenlu No. 6/2021, struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal mencakup:

1. Bagian Program dan Pengendalian Intern, terdiri dari Subbagian Perencanaan Kinerja, Subbagian Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Intern, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan; Subbagian Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan, terdiri dari Subbagian Pengembangan Organisasi dan Manajemen Risiko, Subbagian Analisis Hasil Pengawasan, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bagian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, terdiri dari Subbagian Pengelolaan Pengaduan dan Kepatuhan Pegawai, Subbagian Pengelolaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Fungsional Penata Kanselera, Pranata Informasi Diplomatik, Arsiparis, Fungsional Perencana, dan jabatan fungsional lainnya.

Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



I.2. Aspek Strategis Organisasi

Set. Itjen memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Set.Itjen ikut berkontribusi dalam mengimplementasikan strategi kebijakan Inspektorat Jenderal sebagai penjabaran dari arah kebijakan Kemenlu terkait dengan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi dan strategi Kemenlu dalam tata kelola pengawasan intern berbasis risiko.

Strategi kebijakan Inspektorat Jenderal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pengawasan intern berbasis risiko dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Meningkatkan pengelolaan kinerja dan anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja guna mendukung penerapan manajemen kinerja yang akuntabel;
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan; dan
4. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung kemajuan proses RB Kemenlu, khususnya pada area perubahan penguatan pengawasan.

Dalam mengimplementasikan strategi kebijakan Inspektorat Jenderal diatas, Set. Itjen melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan dan pedoman terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Itjen selaku APIP;
2. Pengembangan database dan aplikasi pendukung tugas dan fungsi pengawasan;
3. Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan serta administrasi dan arsip;
4. Pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan; (v) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan;
5. Pemberian dukungan BMN yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
6. Pengelolaan kinerja dengan prinsip anggaran berbasis kinerja;
7. Tata kelola perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja yang akuntabel;
8. Dukungan analisis atas hasil pengawasan intern dan ekstern;
9. Penguatan peran APIP dalam pembangunan ZI dan pengelolaan pengaduan;
10. Penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam proses RB Kemenlu, khususnya dalam area perubahan penguatan pengawasan; dan
11. Peningkatan jumlah perolehan predikat ZI WBK dan WBBM.



Bab II

Perencanaan Kinerja

Uraian ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mencakup Rencana Strategis (Renstra), Peta Strategis, dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal TA 2023 dan penjabaran alasan perubahan IKU dan target IKU TA 2023

VISI

*"Menjadi Penggerak Utama
dalam Mewudukkan Tata Kelola
Organisasi Inspektorat Jenderal
yang Baik"*



Sekretariat Inspektorat Jenderal

MISI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Visi Set.Itjen dilaksanakan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:



Memperkuat tata kelola pengawasan intern berbasis risiko dengan dukungan teknologi informasi (TI);



Meningkatkan ketersediaan SDM dan BMN, baik kualitas maupun kuantitas, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal;



Meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja (value for money);



Meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan intern dan ekstern; dan



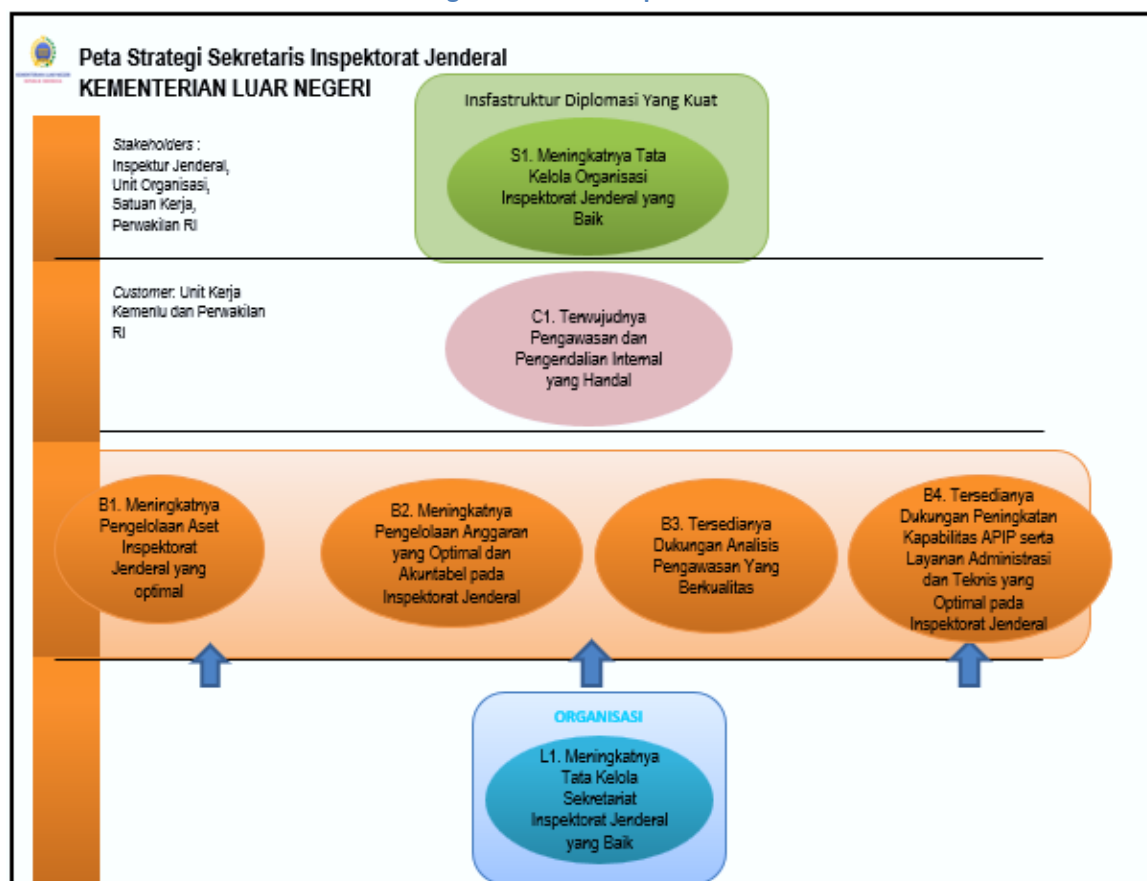
Mendorong penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.

II.2. Peta Strategi

Set.Itjen telah menyusun Peta Strategi tahun 2023 berdasarkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) serta hasil revisit/peninjauan kembali IKU dalam rangka menjalankan visi dan misinya. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI dan telah diadopsi oleh seluruh unit organisasi pusat dan perwakilan RI di luar negeri sejak tahun 2019.

Peta Strategi Set.Itjen tahun 2023 menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terangkum dalam 4 Perspektif sesuai metode BSC. Ke-4 (empat) Perspektif dimaksud, yaitu: (i) *stakeholder perspective*, (ii) *customer perspective*, (iii) *internal business process*, dan (iv) *learning and growth perspective*.

Gambar 3 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2023



II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal terdiri dari 4 (empat) Perspektif, 7 (tujuh) Sasaran Strategis, dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal TA 2023

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik	S1.1	Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	8,85
		S1.2	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	80,01 (A)
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	3 (skala 4)
Internal Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal yang Optimal	B1.1	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu	2,9 dari 4
B2	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel pada Inspektorat Jenderal	B2.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	93
B3	Tersedianya Dukungan Analisis Pengawasan yang Berkualitas	B3.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%
B4	Tersedianya Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP, serta Layanan Administrasi dan Teknis yang optimal pada Inspektorat Jenderal	B4.1	Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP	3,5 (skala 4)
		B4.2	Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal	3,5 (skala 4)
Learning & Growth Perspective				
L1	Meningkatnya Tata kelola organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang baik	L1.1	Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	79,70 (BB)

Tabel 4 Program dan Kegiatan Anggaran Set.Itjen TA 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	
	Pagu Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal 2023	
2.	Total Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2023	
	Pagu Anggaran Akhir Sekretariat Inspektorat Jenderal 2023 (setelah ABT)	



Uraian analisis capaian kinerja Itjen TA 2023 dalam bentuk narasi singkat dan infografis untuk setiap Sasaran Strategis (SS) dan IKU Set.Itjen TA 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Set.Itjen 2023 berdasarkan pengukuran kinerja pada e-Kinerja 2.0/AKSI adalah sebesar 103,26. NCKO tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perolehan NCKO dimaksud sedikit menurun 1,25 poin dibanding tahun sebelumnya (2022: 104,51). Namun demikian, perolehan NCKO Set.Itjen 2023 dihasilkan dari perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Berikut adalah perincian capaian kinerja dari setiap perspektif.

Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Set.Itjen TA 2023

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Stakeholder Perspective</i>	25%	98,17
<i>Customer Perspective</i>	15%	115,67
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	104,30
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	100,25
Total NCKO	100%	103,26

Gambar 4 Perbandingan NCKO Set.Itjen TA 2023 dan



Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja Set.Itjen dilakukan secara triwulan dengan melakukan kegiatan pertemuan dengan para pengelola kinerja dan melakukan input data pada aplikasi kinerja dan anggaran terdiri dari e-Monev Bappenas, e-Kinerja 2,0 AKSI Kemenlu dan SMART Kemenkeu. Berdasarkan monev kinerja secara triwulan diperoleh NCKO Set.Itjen triwulan sebagai berikut:

Tabel 6 Matriks NCKO Triwulan Set.Itjen

Triwulan	Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)	Predikat
I	120	ISTIMEWA
II	120	ISTIMEWA
III	114	ISTIMEWA
IV	103,26	ISTIMEWA

Sumber: e-Kinerja 2,0/AKSI Kemenlu: www.aksi.kemlu.go.id

Sesuai dengan perencanaan kinerja Set.Itjen TA 2023 yang telah ditetapkan pada PK Set.Itjen TA 2023, disimpulkan bahwa capaian kinerja Set.Itjen adalah diatas espektasi dengan hampir seluruh target IKU yang ditetapkan dapat tercapai dengan sangat baik. Penetapan target yang menantang, realistis dan achievable menjadikan NCKO Set.Itjen diperoleh dengan tanpa adanya capaian kinerja yang melewati batas toleransi (120%).

Meskipun, terdapat 1 IKU yang tidak mencapai target, yakni IKU “Nilai Reformasi Birokrasi pada komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN”, namun realisasi IKU tersebut belum mencerminkan kinerja Set.Itjen tahun 2023 mengingat KemenpanRB belum menyampaikan laporan hasil evaluasi RB tahun 2023 hingga saat LKj ini disusun.

Analisis secara detil atas pencapaian kinerja berbasis BSC dari setiap perspektif disampaikan merujuk panduan LKj yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) selaku Manajer Kinerja Organisasi dan Perwakilan (MKOP), Permenlu 4 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja di Kemenlu dan Perwakilan RI serta mengacu pada PermenPANRB No. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE



Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi. Hal ini merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi.

Tata kelola juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU):

The graphic has a red and orange gradient background. A pink sticky note at the top left contains the text 'IKU S1.1'. Below it, the title 'Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN' is written in bold black font. A horizontal line separates the title from the description. The description text reads: 'IKU ini mengukur peran dan kontribusi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan intern kepada Unit Organisasi, Unit Kerja dan Perwakilan RI dalam mendukung pencapaian tujuan RB, khususnya perwujudan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN'.

The graphic has a red and orange gradient background. A pink sticky note at the top left contains the text 'IKU S1.2'. Below it, the title 'Nilai AKIP Inspektorat Jenderal' is written in bold black font. A horizontal line separates the title from the description. The description text reads: 'IKU ini mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.'

Analisis IKU S1.1. Nilai RB pada Komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Deskripsi IKU

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal (Itjen) turut berkontribusi dalam mendukung proses kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu. Itjen selaku APIP memiliki peran penting sebagai penjamin mutu dan melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan program kegiatan yang dilakukan unit organisasi/satuan kerja Kemenlu berdasarkan pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta bersih dan bebas KKN.

Oleh karenanya, Set. Itjen menggunakan IKU Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN untuk mengukur kontribusi Itjen terhadap Reformasi Birokrasi Kemenlu dalam beberapa tahun terakhir.

Realisasi IKU S1.1 Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat pengawasan dalam rangka peningkatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenlu:

1. Pembangunan Zona Integritas bagi unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh predikat Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Pengelolaan lima kanal Pengaduan Masyarakat (LAPOR, Email Pengaduan, Telpun Hotline, WhatsApp dan *Whistle Blowing System*) serta penanganan Benturan Kepentingan;
3. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
4. Keikutsertaan dalam Survei Persepsi Integritas (SPI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi Kinerja

Realisasi IKU S1.1 Nilai RB pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menggunakan hasil penilaian RB Kemenlu tahun 2022, mengingat KemenPanRB belum memberikan hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023 hingga saat penyusunan LKj. Dengan target 8,85, realisasi IKU S1.1 tahun 2022 adalah 8,51 sehingga capaian kinerja adalah 96,16%.

Tabel 7 Capaian kinerja IKU S1.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN*	
Realisasi		8,51
Target		8,85
Capaian		96,16%

(*nilai yang digunakan adalah nilai komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dari evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022)

Nilai tersebut diperoleh dari rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenpanRB. Tabel di bawah ini menampilkan rincian hasil evaluasi RB tahun 2021 dan 2022.

Tabel 8 Komponen Penilaian Nilai RB Kemenlu

No.		Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
				2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20,00	15,87	16,29	
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,43	6,76	
3.	Reform	30,00	21,73	21,81	
Total Komponen Pengungkit		60,00	44,03	44,86	
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,45	8,52	
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,28	9,48	
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,84	8,51	
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,28	8,09	
Total Komponen Hasil		40,00	33,85	34,59	
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengkungkit + Hasil)		100,00	77,88	79,46	

Perbandingan Kinerja

Realisasi IKU S1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN baru dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur IKU, target dan formula penghitungan realisasi yang ditetapkan pada tahun 2022. Terdapat penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun dengan target yang lebih tinggi.

Tabel 9 Perbandingan Capaian IKU S1.1 Tahun 2022-2023

Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
S1.1	8,84	8,84	100 %	8,85 ↑	8,51 ↓	96,16 %

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Nilai RB pada komponen hasil pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan hasil dari upaya penguatan pengawasan yang dilakukan Itjen dalam kerangka RB dengan melibatkan seluruh unit kerja/satker terkait Kemlu di pusat dan Perwakilan RI. Upaya tersebut mencakup komponen/unsur pada area perubahan penguatan RB yang meliputi pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan dan *Whistle Blowing System (WBS)*, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Turunnya realisasi dibanding tahun sebelumnya disebabkan terdapat penurunan jumlah unit penerima ZI pada tahun 2022, yakni hanya 1 unit kerja/perwakilan RI. Mengingat KemenpanRB belum menyampaikan hasil RB 2023, maka keberhasilan Set.Itjen dalam meningkatkan jumlah unit kerja penerima ZI pada tahun 2023 (kenaikan 100%) belum tergambarkan.

Kendala dan Tantangan

Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kemajuan RB, terutama peran Set. Itjen dalam mengoordinasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Belum tingginya minat unit / satuan kerja terhadap pembangunan ZI dan ZI belum sepenuhnya menjadi prioritas kinerja bagi unit kerja di Pusat dan Perwakilan RI

2. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara daring/*hybrid*, sehingga pendampingan dan koordinasi yang dilakukan kepada unit kerja Pusat dan Perwakilan RI dalam membangun ZI belum maksimal. Khususnya terhadap unit / satker Perwakilan RI di luar negeri, seluruh evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional KemenPANRB (TPN) hanya dilakukan berdasarkan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan wawancara jarak jauh secara online melalui zoom, tanpa melakukan peninjauan langsung dan evaluasi ke lapangan, sehingga TPN tidak mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan detail mengenai keunggulan dan inovasi Perwakilan RI di luar negeri.
3. Rendahnya komitmen unit / satuan kerja, baik di Pusat maupun Perwakilan untuk mengikuti Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM. Dalam hal ini, pada tahun 2023 terdapat 18 unit / satker di Pusat dan Perwakilan yang menyampaikan minat untuk mengikuti Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM, namun hanya 12 unit / satuan kerja yang lulus evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), sedangkan sisanya mengundurkan diri dengan alasan belum siap atau terlambat menyampaikan data/kelengkapan.
4. Terbatasnya jumlah SDM yang menangani isu tata kelola pemerintah yang baik. Rendahnya jumlah SDM tersebut antara lain diakibatkan oleh tingkat mutasi yang tinggi di Itjen.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan dalam memantau pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis, tukar pengalaman, sosialisasi dan pendampingan kepada Satker/Perwakilan yang mengikuti pengusulan WBK/WBBM.
2. Melakukan pemetaan terhadap potensi dan kekurangan dari Satker pusat dan Perwakilan RI yang diusulkan, seperti peran agen perubahan, inovasi pada pelayanan dan integritas, peta risiko (identifikasi dan mitigasi risiko), kekhasan dan keunggulan Satker/Perwakilan, serta replikasi inovasi/kinerja Satker/Perwakilan.
3. Memasukan isu pentingnya pembangunan ZI dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) dan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan RB.
4. Melibatkan SDM Auditor sebagai TIM dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reviu internal LKE ZI.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam pencapaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi pada Komponen Hasil Pemerintahan yang bersih dan

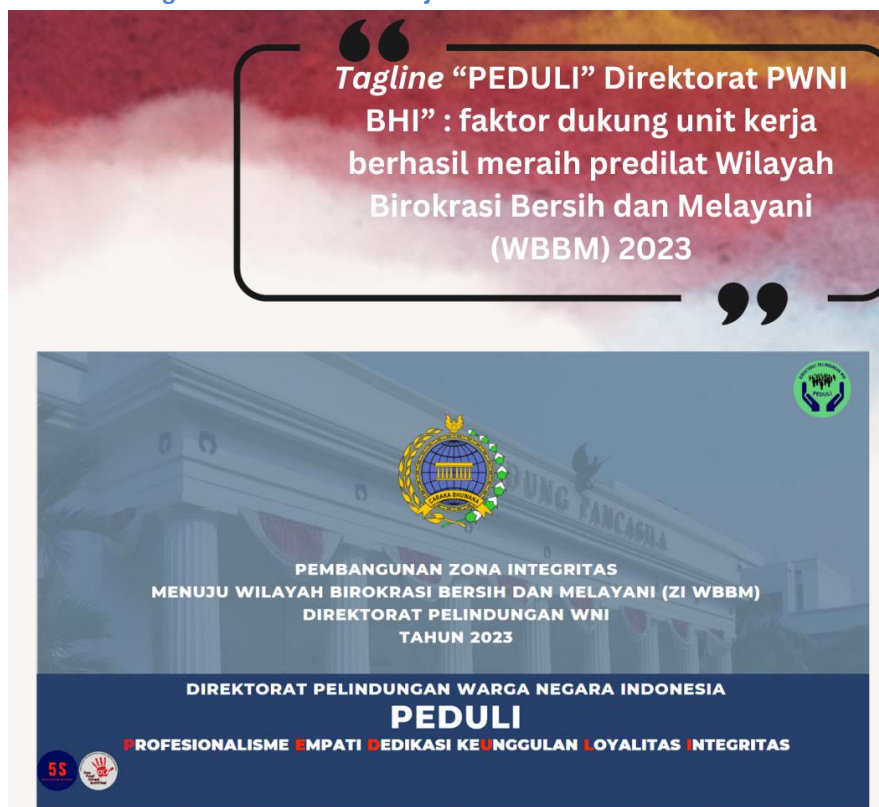
bebas KKN, Set.Itjen melakukan sejumlah kegiatan sepanjang tahun 2023 dalam rangka penguatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagai bagian dari fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2023 Kemenlu mengusulkan 11 Unit / Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan RI untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yakni 9 Unit Kerja/Perwakilan untuk WBK (Ditjen Amerop, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Dar es Salaam, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KBRI Windhoek, KJRI Dubai, KJRI Johor Bahru, KJRI Vancouver) dan 2 Unit / Satuan Kerja/Perwakilan untuk WBBM (Direktorat PWNI, dan KBRI Bangkok) Dari 11 unit / satuan kerja yang diusulkan, Kemenlu berhasil mendapatkan predikat WBK untuk 1 unit / satuan kerja, yaitu KJRI Vancouver, dan 1 unit / satuan kerja mendapatkan predikat WBBM, yaitu Direktorat Pelindungan WNI. Hal ini menjadikan kenaikan 100% untuk unit peraih predikat WBK/WBBM dibanding tahun sebelumnya.

Infografis 5 Inovasi Perwakilan RI Penerima WBK 2023





Perbandingan perolehan predikat WBK/WBBM tahun 2019 - 2023 di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Perolehan Predikat WBK/WBBM Tahun 2019-2023

Pembangunan ZI di Satker Pusat dan Perwakilan RI	2019	2020	2021	2022	2023
Satker/Perwakilan yang diusulkan	18	12	15	8	11
Satker/Perwakilan penerima WBK	5	2	3	1	1
Satker/Perwakilan penerima WBBM	3	0	1	0	1
Total Satker/Perwakilan penerima predikat WBK/WBBM	8	2	4	1	2

Dalam upaya meningkatkan pencanangan ZI di Kemenlu tahun 2023, dilakukan pemetaan terhadap potensi dan kekurangan dari satker pusat dan perwakilan yang diusulkan, serta memperkuat hal-hal yang menjadi perhatian saat evaluasi seperti: peran agen perubahan, inovasi pada pelayanan dan integritas, peta risiko (identifikasi dan mitigasi risiko), kekhasan dan

keunggulan satker/perwakilan, serta replikasi inovasi/kinerja satker/perwakilan. Upaya dimaksud diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan pendampingan WBK/WBBM kepada unit kerja di Pusat dan Perwakilan RI yang mengusulkan diri di tahun berjalan dan/atau yang memiliki rencana komitmen mengikuti WBK/WBBM pada tahun berikutnya.

2. Penerapan Sistem Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*

Untuk mendukung terciptanya Kementerian Luar Negeri yang bersih dan bebas KKN, Set. Itjen mengoordinasikan dan mendorong pembentukan *Liaison Officer* (LO) atau Satgas, baik di Unit Organisasi Pusat maupun Perwakilan RI, serta memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut terhadap pelaporan yang diterima dari berbagai kanal pengaduan/pelaporan.

Dari pengaduan yang terverifikasi, pengaduan telah selesai dan masih proses penyelesaiannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak Permintaan Informasi dan penyampaian Aspirasi.

Infografis 7 Data pengaduan yang terselesaikan Tahun 2023



Infografis 8 Perbandingan Laporan Pengelolaan Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2022 dan 2023



3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

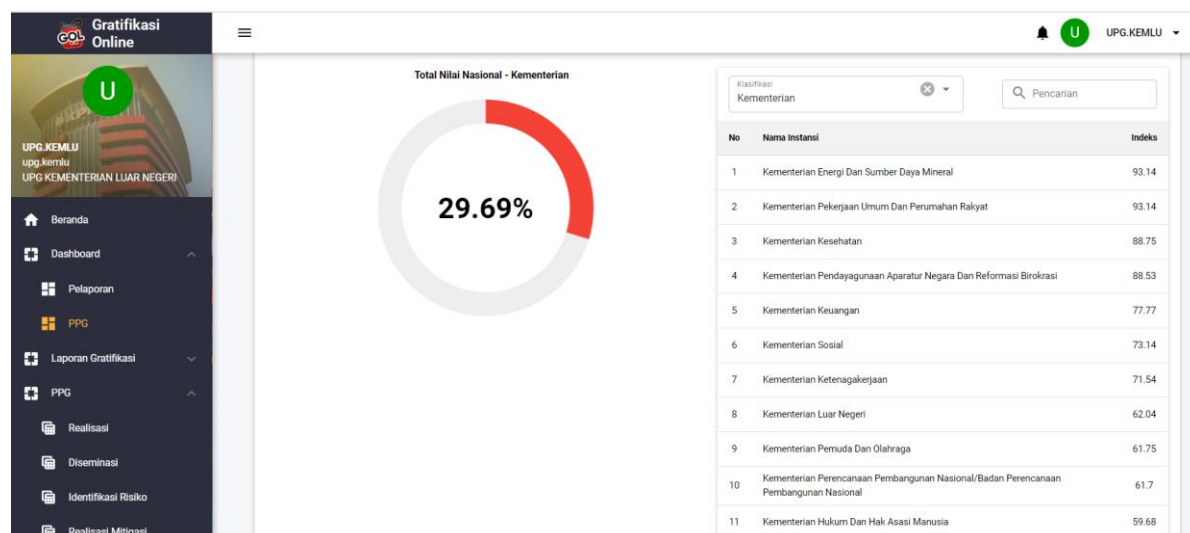
Berdasar data dari Gratifikasi Online KPK RI (<https://gol.kpk.go.id>) pada Pada tahun 2023 secara keseluruhan terdapat pelaporan gratifikasi, dengan rincian: (i)

Sejumlah kegiatan terkait pengelolaan pengendalian gratifikasi:

- Kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada internal Kemenlu melalui kegiatan “KPK Mendengar (7 Februari 2023).
- Rangkaian Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri meliputi: 28 Oktober 2023 (pembahasan awal dan *zero draft* di Pusdiklat Kemenlu RI); 14 November 2023 (pembahasan pertama di Inspektorat Jenderal); 28 November 2023 (diskusi dan permintaan masukan Direktorat Gratifikasi KPK); 15 Desember 2023 (pembahasan kedua di Yogyakarta).
- Penyampaian Materi mengenai pencegahan gratifikasi dalam kurikulum Diklat Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenlu serta pembekalan dasar pegawai yang akan penugasan di Perwakilan RI.

Laporan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Kemenlu tahun 2023 kepada KPK, mendapatkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahun 2023 sebesar 62,04 dan menempatkan Kemenlu pada peringkat ke-8 di tingkat Kementerian. Nilai ini adalah nilai realisasi triwulan 2, dimana hingga LKj ini disusun, KPK belum mengeluarkan total nilai realisasi 2023.

Gambar 5 Penilaian Monev Gratifikasi Tahun 2023



4. Keikutsertaan dalam Survei Persepsi Integritas (SPI) – KPK

Sejak 2021 SPI ditetapkan menjadi prioritas Nasional dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kegiatan SPI bersifat *mandatory* dan dilakukan di semua K/L/PD dan berada di bawah koordinasi Inspektorat atau Satuan Pengawas Internal dengan didampingi KPK.

Hingga LKj ini disusun, KPK belum mengeluarkan nilai SPI Kemenlu 2023, sehingga data yang digunakan untuk sementara adalah nilai yang dikeluarkan oleh KPK pada 2022 yakni sebesar 81,76 (peringkat ke-6 dari 33 kementerian), berada di atas rata-rata nasional yaitu 71,94. Dalam hal ini, catatan KPK atas SPI Kemenlu adalah diperolehnya responden yang lebih jujur dan berani dalam memberikan penilaian, tingkat responden terhadap SPI yang semakin meningkat, serta data responden yang lebih baik dari sisi kualitas, kuantitas dan variasi data.

Responden terdiri dari responden internal (ASN Kemenlu, 197 responden *eligible*), responden eksternal (pengguna layanan, 285 responden *eligible*) dan responden *expert* (narasumber ahli yang memiliki pengetahuan komprehensif terkait integritas dan korupsi di lokus survei, 12 responden *eligible*).

Proyeksi ke Depan

Beberapa proyeksi ke depan dalam rangka terus meningkatkan capaian kinerja IKU S1.1, antara lain:

1. Memperkuat jumlah dan kapasitas SDM di bidang tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup pembangunan ZI, penanganan pengaduan, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan juga pemantauan pelaksanaan SPI, serta melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI pada tahun 2024.
2. Memberikan bimtek terkait pembangunan ZI dan pengisian LKE ZI tidak hanya diberikan kepada unit kerja di Pusat dan Perwakilan RI yang diusulkan, tetapi juga kepada TPI Kemenlu agar dapat mendukung penilaian internal yang lebih memadai.
3. Mendorong keikutsertaan unit / satuan kerja di Pusat dan Perwakilan RI untuk mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM melalui penyampaian imbauan kepada seluruh unit / satuan kerja di Pusat dan Perwakilan RI.
4. Meningkatkan kunjungan lapangan ke Perwakilan RI dalam rangka pendampingan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Dokumentasi





Analisis IKU S1.2. Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Deskripsi IKU

Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengukur sejauh mana Itjen telah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen AKIP mencakup dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan dokumen evaluasi akuntabilitas internal.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemenlu dengan mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Kemenlu dan Perwakilan RI. Dalam hal ini, Itjen sebagai salah satu unit organisasi di Kemenlu turut dievaluasi atas implementasi sistem AKIP oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) III yang memegang desk Itjen.

Tabel 11 Klasifikasi Nilai AKIP

Predikat	Skor	Intepretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Realisasi IKU S1.2 dihitung dengan menggunakan rumus:

Informasi Kinerja

Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap dokumen AKIP Itjen tahun 2022 oleh Inspektorat Wilayah III tanggal 4 Juli 2023, Nilai AKIP Itjen mengalami peningkatan menjadi 80,15 (A). Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 80,01 (A) dengan capaian 100,17%. Peningkatan nilai AKIP Itjen tersebut menempatkan itjen pada peringkat keempat pengelolaan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi Eselon I tahun 2022, setelah Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

Tabel 12 Capaian Kinerja IKU S1.2

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai AKIP Itjen	Nilai AKIP Itjen*	
Realisasi		80,15
Target		80,01
Capaian		100,17%

**Nilai AKIP yang digunakan adalah nilai tahun 2022 berdasarkan Penilaian dokumen AKIP Itjen tahun 2022 dan 2023, sesuai evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2023.*

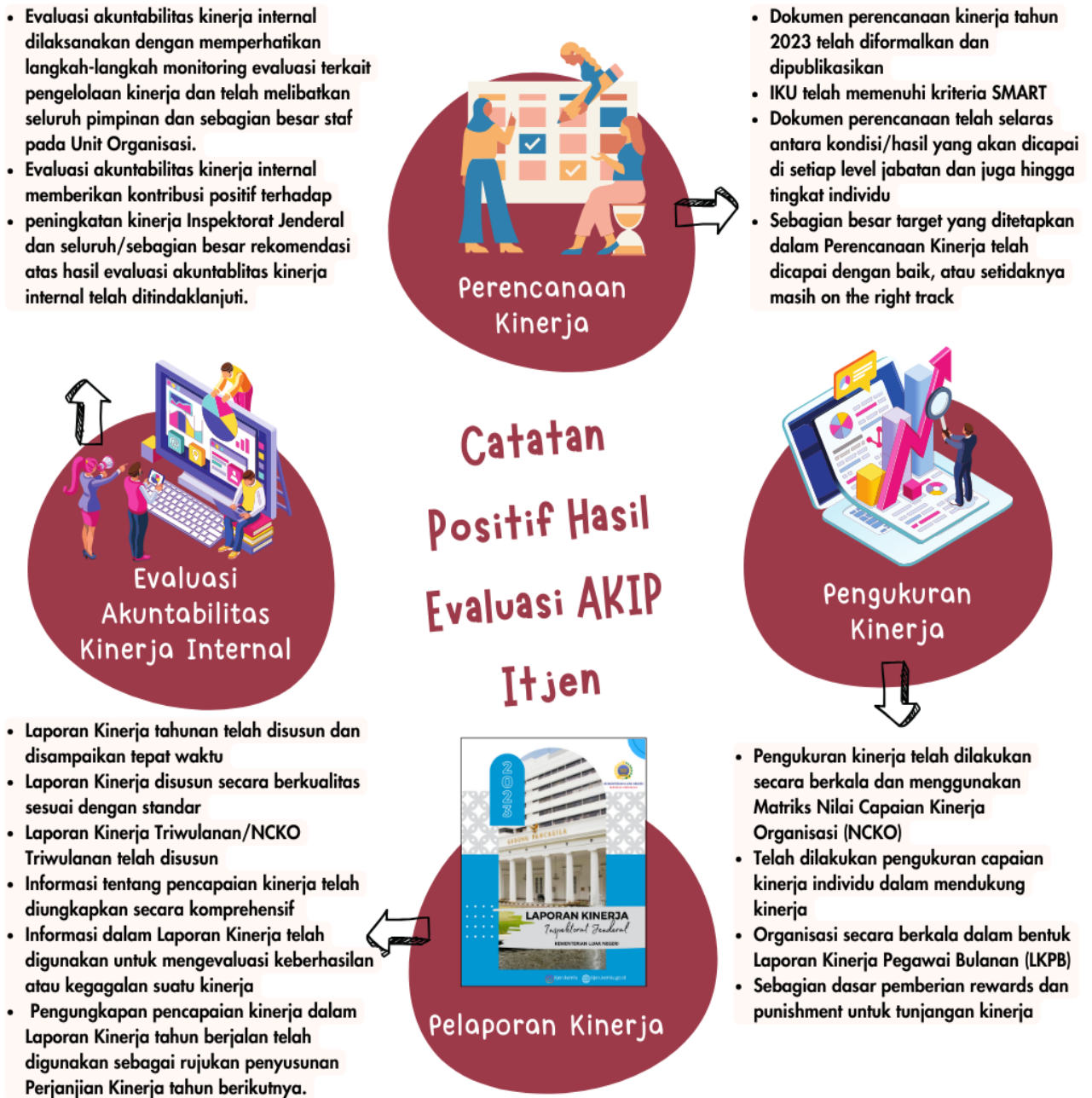
Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 80,15 atau dengan kategori penilaian A (Memuaskan).

Tabel 13 Komponen Penilaian AKIP Itjen

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
PERENCANAAN KINERJA	30%	23,10
PENGUKURAN KINERJA	30%	25,50
PELAPORAN KINERJA	15%	11,55
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25%	20
HASIL NILAI EVALUASI AKIP	100%	80,15

Beberapa catatan positif dalam hasil evaluasi AKIP Itjen, antara lain:

Infografis 9 Catatan Positif dalam Hasil Evaluasi AKIP Itjen



Perbandingan Kinerja

Realisasi IKU S1.2 pada tahun 2023 mengalami peningkatan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk tahun 2023 Nilai AKIP Itjen mencapai 80,15 (A). Peningkatan nilai AKIP Itjen tersebut disajikan dalam table berikut:

Tabel 14 Perbandingan Capaian IKU S1.2 Tahun 2020-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
S1.2	78	78,22	100,28 %	79 ↑	78,50 ↑	99,37 %	79,5 ↑	80,08 ↑	100,73 %	80,01 ↑	80,15 ↑	100,74%

Jika dibandingkan dengan proyeksi target jangka menengah yang tertera pada Renstra Set.Itjen 2020 – 2024 Realisasi IKU S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Itjen tahun 2023 yaitu 80,15 telah selaras dengan target renstra Set.Itjen tahun 2020-2024 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81. Dengan pencapaian realisasi di tahun 2023, dapat diprediksikan untuk tahun 2024 tingkat pencapaian target dalam proyeksi renstra dapat *achievable (on the track)* jika realisasi IKU 2024 juga meningkat.

Tabel 15 Tingkat *on the track* Target Renstra dengan Realisasi 2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target PK 2023	Proyeksi Target Renstra	
			2023	2024
IKU S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	80,15	80.01	81	82
Tingkat <i>on the track</i> target Renstra dengan realisasi 2023			99,51%	98,30%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Set.Itjen berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan kinerja unit organisasi eselon I Itjen mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Melalui koordinasi intensif dengan pengelola kinerja di unit kerja eselon II Itjen, target IKU S1.2. Nilai AKIP Inspektorat Jenderal berhasil direalisasikan melampaui target didukung faktor penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1. Upaya perbaikan implementasi SAKIP Itjen, khususnya dalam penyajian Laporan Kinerja (LKj) yang terus disempurnakan, sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk unit organisasi Itjen.
2. Kepedulian pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai Itjen dalam pengelolaan kinerja, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga tahap pelaporan dan dalam monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pengelolaan kinerja juga didukung dengan SDM yang mumpuni dan memiliki sertifikat terkait manajemen kinerja.

3. Guna memantau pelaksanaan kinerja organisasi dan memastikan adanya kepedulian seluruh pegawai Itjen terhadap implementasi AKIP, secara rutin Itjen menyelenggarakan Dialog Kinerja yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan diikuti oleh segenap pegawai untuk membahas pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan strategi pencapaian kinerja secara optimal. Pada tahun 2023, Dialog Kinerja Semester I dilaksanakan pada September 2023 dan Dialog Kinerja Semester II dilakukan pada Desember 2023.
4. Secara berkala Manajer Kinerja Organisasi (MKO) dan Sub-manajer Kinerja Organisasi (SMKO) bersama penanggung jawab perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja serta pengelola anggaran di lingkungan Itjen melakukan koordinasi untuk membahas isu-isu terkait pelaksanaan kinerja dan anggaran.

Kendala dan Tantangan

Meskipun dari sisi capaian kinerja terdapat peningkatan Nilai AKIP Itjen dari tahun ke tahun, namun Itjen masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan kinerja, di antaranya:

5. Pergantian MKO, SMKO dan pengelola kinerja dan anggaran selama ini tidak selalu didukung dengan proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang memadai, sehingga pejabat baru kurang familiar dengan proses perencanaan, monev dan pelaporan kinerja.
6. Terbatasnya SDM yang ada di Itjen mengakibatkan pekerjaan SMKO dalam perencanaan, monev dan pelaporan kinerja yang terkadang dilakukan bersamaan pekerjaan pengawasan dan kegiatan APIP.
7. Kurangnya pemahaman pengelola kinerja dan anggaran dalam pengisian aplikasi perencanaan dan monitoring kinerja, dan keterkaitan antar-aplikasi.

Upaya Perbaikan

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kinerja di lingkungan Itjen yang secara umum telah menunjukkan peningkatan secara signifikan, maka ke depan akan terus dilakukan penguatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tingkat unit kerja Eselon II, termasuk upaya perbaikan dalam pengelolaan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar-pengelola kinerja dan anggaran secara berkesinambungan untuk membahas *progress* dan hambatan yang dihadapi.
2. Mengikutsertakan pengelola kinerja dan anggaran dalam forum diskusi dan bimbingan teknis yang dilakukan level Kemenlu, atau lingkup Itjen dengan mengundang narasumber dari Biro Perencanaan Organisasi.

3. Menyusun sejumlah langkah-langkah penambahan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal baik melalui Kemen PANRB maupun melalui Kemenkeu c.q Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Analisis Program Pendukung Capaian

Dukungan program untuk mencapai kinerja IKU S1.2:

1. Perencanaan Kinerja:

- Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan serta publikasi dokumen AKIP pada portal Kemenlu dan aplikasi ESR (Evaluasi SAKIP Reviu) KemenpanRB.
- Pembahasan penyusunan dokumen perencanaan 2023 melibatkan seluruh pegawai Itjen melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 24-27 Januari 2023.
- Koordinasi dengan BPO selaku MKOP terhadap penetapan target IKU Itjen 2023 dengan standar target IKU yang menantang, realistik dan achievable.

2. Pengukuran Kinerja:

- Penyampaian evaluasi kinerja yang terukur dan berorientasi hasil melalui penetapan IKU berbasis *BSC*.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui aplikasi seperti e-Monev Bappenas, e-Kinerja Kemenlu 2,0 (AKSI), dan SMART Kemenkeu.

3. Pelaporan Kinerja:

- Penyusunan Laporan Kinerja dengan memuat analisis capaian kinerja mencakup analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU, perbandingan kinerja, kendala/tantangan, upaya perbaikan dan proyeksi ke depan sesuai ketentuan.
- Kegiatan penyusunan dan pembahasan LKj melibatkan seluruh pegawai Itjen khususnya para pengelola kinerja melalui Kegiatan Penyusunan Konsep Awal LKj pada tanggal 18-22 Desember 2023.
- Publikasi LKj beserta dokumen AKIP lainnya pada portal Kemenlu dan aplikasi ESR (Evaluasi SAKIP Reviu) KemenpanRB.
- Penyampaian LKj dan dokumen AKIP lainnya tepat waktu.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Penyusunan Laporan Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP untuk perbaikan implementasi sistem AKIP. Laporan tindak lanjut telah disampaikan sebelum 1 November sesuai ketentuan.
- Kegiatan monev kinerja dan anggaran mengundang seluruh pengelola kinerja secara berkala, dan kegiatan bilik Itjen dengan BPO dalam rangka monev kinerja dan anggaran Kemenlu dan Perwakilan RI secara berkala.
- Pelaksanaan Dialog Kinerja secara rutin yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan diikuti oleh segenap pegawai guna membahas pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan strategi pencapaian kinerja secara optimal. Pada tahun 2023, Dialog Kinerja Semester I dilaksanakan pada bulan September 2023 dan Dialog Kinerja Semester II dilakukan pada bulan Desember 2023.

Proyeksi ke Depan

Target Itjen adalah dapat terus meningkatkan nilai AKIP setiap tahunnya. Kenaikan nilai AKIP di unit kerja dan Perwakilan tentunya mendukung nilai AKIP Kemenlu. Mengingat gap paling tinggi terdapat pada komponen “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”, maka Itjen akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan frekuensi koordinasi antar pengelola kinerja di lingkungan Itjen.
2. Peningkatan pemahaman pengelola kinerja melalui keaktifan para pengelola kinerja dalam mengikuti bimtek terkait pengelolaan kinerja.
3. Kegiatan *transfer of knowledge* antar BPO dan Itjen dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja agar perbaikan implementasi sistem AKIP berjalan selaras.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk penyempurnaan implementasi Sistem AKIP Itjen ke depan. Sesuai dengan LHE Inspektorat Wilayah III terkait AKIP Itjen 2022, beberapa telah ditindaklanjuti dalam tahun 2023 dan akan selesai ditindaklanjuti tahun 2024, antara lain:

Tabel 16 Tindak Lanjut Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Itjen

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP agar ditindaklanjuti	Sesuai rekomendasi yang diberikan dalam LHE AKIP Itjen Tahun 2022, seluruh	Tabel Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Unit

		rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah/terus ditindaklanjuti.	Organisasi Inspektorat Jenderal
2.	Penetapan target kinerja pada Renstra agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkembangan situasi internal dan eksternal dengan tetap memperhatikan target kinerja yang ditetapkan pada tingkatan Kemenlu untuk IKU yang sifatnya direct cascading.	a. Inspektorat Jenderal telah menetapkan target IKU dengan merujuk kepada capaian kinerja sebelumnya dan perkembangan situasi internal dan eksternal dengan tetap memperhatikan target kinerja IKU yang ditetapkan pada tingkatan Kemenlu untuk IKU yang sifatnya Direct Cascading. b. IKU direct cascading pada Itjen adalah (i) Nilai Opini BPK; (ii) Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu; (iii) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu; (iv) Nilai AKIP Kemenlu. Target keempat IKU dimaksud ditetapkan merujuk pada penetapan target IKU Kemenlu-wide. c. Penetapan target IKU Itjen memuat prinsip menantang (lebih tinggi dari target tahun sebelumnya, dan melihat capaian kinerja tahun sebelumnya), realistis (tidak serta merta di atas realisasi tahun sebelumnya, karena juga melihat Renstra dan kondisi tantangan yang dihadapi), dan achievable (dengan harapan dapat tetap tercapai di tahun mendatang). d. Sebagai informasi tambahan, sesuai peraturan nasional. Inspektorat Jenderal kembali menetapkan IKU “nilai IACM” dengan nomenklatur “Level Kapabilitas APIP) sejak 2022. Hal ini merujuk pada amanat Peraturan Kepala BPKP No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D bahwa APIP c.q Itjen K/L/D harus melakukan PM atas level kapabilitas APIP, dan terdapat pernyataan pada penilaian IACM untuk APIP	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal tahun 2024. Dokumen referensi saat penetapan target: a. LKj Itjen 2023 b. PK Menlu 2024 c. Renstra Itjen 2020 - 2024 d. Peraturan Kepala BPKP No. 8 tahun 2021

		memiliki IKU terkait IACM	
3.	Memberikan arahan kepada pegawai/staf terkait cara mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.	a. Inspektorat Jenderal secara berkesinambungan melakukan movev atas kinerja yang dihadiri oleh seluruh pengelola kinerja di Itjen. Kegiatan movev di antaranya dilakukan sebelum pelaksanaan (back to back) dengan Dialog Kinerja Organisasi. Bahan kertas kerja berupa matriks informasi kinerja dan matriks NCKO yang diisi secara online (kemlu cloud) oleh seluruh SMKO Itjen. b. Secara keseluruhan, Dialog Kinerja Organisasi (DKO) menjadi forum pertemuan seluruh pimpinan dan jajaran serta staf untuk membahas kinerja, termasuk memberikan arahan kepada pegawai/staf terkait cara mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan (seperti PK dan Manual IKU). c. Sebagai informasi, DKO Itjen dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun (tiap semester).	a. Nota Dinas Laporan Dialog Kinerja Senester I No. 38248/PW/09/2023/67 tanggal 12 September 2023 a. Nota Dinas Laporan Dialog Kinerja Semester II No.53045/PW/12/2023/67 tanggal 7 Desember 2023 b. Link Matriks NCKO dan Matriks Informasi Kinerja yang diisi bersama oleh pengelola kinerja dan disampaikan kepada paraf staf untuk diisi sesuai tusi:https://cloud.kemlu.go.id/s/E26B8TcBJ7dA3yC
4.	Pegawai/Staf di lingkungan Inspektorat Jenderal agar lebih mempedulikan penyajian informasi di dalam Laporan Kinerja.	a. Pegawai/staf di lingkungan Inspektorat Jenderal memperdulikan penyajian informasi di dalam Laporan Kinerja (LKj). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran seluruh pegawai Itjen pada kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO), yang mana hasil pembahasannya merupakan bahan dalam penyusunan LKj. b. Selain itu, untuk memastikan adanya kepedulian pegawai lainnya (selain MKO/SMKO)	a. Nota Dinas Laporan Dialog Kinerja Semester I No. 38248/PW/09/2023/67 tanggal 12 September 2023 b. Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan LKj 2022 Nomor 03334/PR/01/2023/67 Tanggal 24 Januari 2023 c. Nota Dinas Laporan Dialog Kinerja Semester II No.53045/PW/12/2023/67 tanggal 7 Desember 2023

		terhadap penyajian informasi di dalam LKj, Itjen setiap tahun menyelenggarakan kegiatan rapat penyusunan LKj yang dihadiri tidak hanya oleh para pengelola kinerja, tetapi juga para Subbag TU, dan APIP di lingkungan Itjen yang merupakan pegawai Itjen	
5.	Pengelola Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal agar mempunyai kualifikasi yang memadai dibuktikan dengan Sertifikat/Bimtek pengelolaan kinerja	a. Pengelola Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mengikuti bimtek terkait aplikasi e-kinerja guna meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan kinerja, salah satunya pada tanggal 5 - 7 Juni 2023. Kegiatan dibuktikan dengan sertifikat. b. Tim pengelola kinerja Inspektorat Jenderal telah mengikuti bimtek penyusunan laporan kinerja yang diselenggarakan oleh BPO, dengan menghadirkan narasumber dari PPN/Bappenas dan Kata Data Indonesia pada tanggal 14-15 November 2023	a. Sertifikat Soft Launching dan Familiarization Aplikasi e-kinerja 2.0 untuk Unit Organisasi dan Satker Pusat yang dilaksanakan tanggal 5 – 7 Juni 2023, dan Sertifikat Bimtek Penyusunan LKj b. Sertifikat bimtek penyusunan LKj kepada Pengelola Kinerja Itjen Nomor 47875/PR/11/2023/33 tanggal 9 November 2023

Dokumentasi



CUSTOMER PERSPECTIVE



Berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021, Inspektorat Jenderal memiliki fungsi dan tugas dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI terhadap anggaran berbasis kinerja melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam sasaran strategis terwujudnya pengawasan yang berintegritas dan akuntabel dijabarkan makna dari pengawasan, berintegritas dan akuntabel.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan

SS C1 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) :



Analisis IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

Deskripsi IKU

Indeks Persepsi Kepuasan adalah ukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi penerima layanan pengawasan Set.Itjen (Unit Kerja/Perwakilan RI) yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan dan tingkat kepuasan atas manfaat yang diterima dari pelayanan pengawasan intern yang dilakukan Set.Itjen.

Set.Itjen melakukan pengawasan dalam kerangka penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri melalui pemantauan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Data tingkat kepuasan penerima layanan atas pengawasan oleh Set.Itjen diperoleh melalui pelaksanaan Survei Layanan Pengawasan Intern. Survei mengacu kepada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00338/B/PW/05/2022/67/11 tentang Pedoman Survei Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Responden yang mengisi survei adalah seluruh Sasaran Pengawasan sesuai dengan tugas pengawasan yang dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023. Pengeisian survei dilakukan secara online melalui <https://kem.lu/surveipersepsi23>

Tabel 17 Kategori dan skala likert survei persepsi kepuasan layanan pengawasan

Indeks/Skala	Kategori
1	Kurang
2	Cukup
3	Baik
4	Memuaskan

Rata-rata nilai hasil survei persepsi kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi IKU C1.1 dihitung dengan menggunakan rumus:

Informasi Kinerja

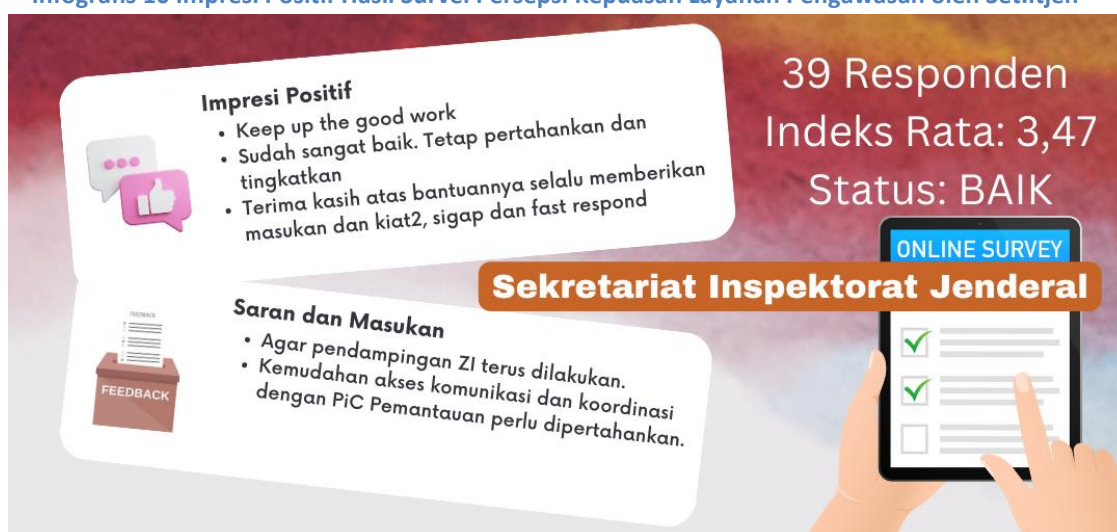
Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar 3,47 dengan target 3 (skala 4). Dengan demikian realisasi kinerja untuk IKU tersebut melampaui target yang ditetapkan dan capaiannya berada pada batas toleransi kinerja maksimal sebesar 115,67%.

Tabel 18 Capaian Kinerja IKU C1.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Indeks
Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	
Realisasi		3,47
Target		3 (skala 4)
Capaian		115,67

39 responden (dari 9 perwakilan dan 2 satker pusat) telah mengisi survei persepsi kepuasan untuk layanan pemantauan penguatan pengawasan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Survei diisi oleh responden dari perwakilan dan satker pusat yang mengikuti proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023. Secara garis besar responden menyatakan puas atas layanan pemantauan yang dilakukan oleh Set.Itjen.

Infografis 10 Impresi Positif Hasil Survei Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan oleh Set.Itjen



Perbandingan Kinerja

Mengingat IKU ini baru diadopsi pada tahun 2022, perbandingan realisasi kinerja termasuk target dan capaiannya baru dapat dibandingkan dengan 1 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian IKU C1.1 Tahun 2022-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
C1.1	3 (skala 4)	3,67	122,33%	3 (skala 4)	3,47 ↓	115,67%

Dibanding tahun sebelumnya, realisasi IKU menurun sebesar 0,2 poin namun tetap mencapai target yang ditetapkan. Sesuai dengan nomenklatur SS C1 adalah “*Terwujudnya Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel*”, yang berarti menjaga indeks persepsi kepuasan atas layanan pengawasan oleh Set.Itjen agar selalu berada pada kategori **Baik**. Sehingga, tidak terdapat perbedaan target dibanding tahun sebelumnya yakni tetap 3 (skala 4) atau sesuai dengan target Renstra Set.Itjen 2020 - 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan dalam pencapaian IKU C1.1 didukung hal sebagai berikut:

1. Upaya penyempurnaan format dan penyederhanaan jumlah pertanyaan survei berbasis *online* dengan dilengkapi video tutorial, sehingga memudahkan responden dalam pengisian dan pengolahan data.
2. Peningkatan jumlah responden yang mengisi survei sehingga berdampak pada semakin akuratnya indeks persepsi kepuasan terhadap layanan pengawasan oleh Set.Itjen. Meskipun menurun secara realisasi dibanding tahun 2022, akan tetapi jumlah responden survei meningkat signifikan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kinerja Set.Itjen dalam memberikan pengawasan dengan mendapat feedback positif dari perwakilan dan satker pusat yang mengikuti proses WBK/WBBM.
3. Keberhasilan Set.Itjen senantiasa mempertahankan indeks 3 disebabkan dengan upaya engagement yang semakin baik dengan seluruh unit baik pusat dan perwakilan yang mengusul pembangunan ZI.

Kendala dan Tantangan

Terdapat sejumlah kendala dalam peningkatan jumlah responden yang melakukan pengisian survei dan kendala lainnya, seperti:

1. Ditemukan data anomali pada saat tabulasi hasil survei, sehingga mempengaruhi akurasi hasil indeks. Hal ini dikarenakan adanya perwakilan yang tidak mendapat layanan pengawasan Set.itjen namun mengisi survei.
2. Aplikasi survei masih memerlukan pengembangan, di antaranya terkait pengisian data profile responden yang perlu dibuat secara rinci agar hasil survei dapat lebih akurat.
3. SDM yang terbatas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan secara optimal dan sebagian besar kegiatan pengawasan dilakukan secara daring.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan atas kendala yang dihadapi, dilakukan:

1. Perbaikan agar responden yang mengisi survei dapat lebih maksimal, dan hasil tabulasi data dijadikan masukan untuk perbaikan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ke depan.
2. Koordinasi dengan Pustik KP terkait penghapusan data anomali dan rencana pengembangan aplikasi.
3. Koordinasi internal Set.Itjen terkait alokasi SDM saat pelaksanaan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kegiatan yang mendukung capaian IKU C1.1 mencakup kegiatan pengelolaan survei, antara lain:

1. Pengawasan dalam kerangka penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri melalui pemantauan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan rangkaian kegiatan:
 - a. Pemantauan pengawasan dalam rangka Pelaksanaan Bimtek Pembangunan ZI dengan narasumber TPN/KemenPANRB (Februari 2023), dan Pendampingan Persiapan Evaluasi ZI dengan narasumber KJRI Cape Town dan TPI (Agustus 2023).
 - b. Memfasilitasi sharing session unit/satker berpredikat WBK/WBBM untuk menularkan keberhasilan ke unit/satker lainnya (Maret-Mei 2023)

- c. Penguatan peran TPI dalam melakukan penilaian internal dengan penambahan anggota tim Pendampingan Lapangan Pembangunan ZI ke 5 perwakilan dan 1 Unit/Satker dalam negeri (Dit. PWNI)
 - d. Pendampingan Ditjen Amerop dalam membangun WBK dan Dit PWNI (WBBM) dalam meraih SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
 - e. Kunjungan lapangan dalam rangka pendampingan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ke Perwakilan RI (KBRI Bangkok, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KJRI Johor Bahru, dan KJRI Vancouver)
- 2. *Enggagement* dengan Unit Kerja dan Perwakilan RI untuk mengisi survei persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 - 3. Pendampingan substansi dan teknis bagi Unit Kerja dan Perwakilan RI yang mengalami kendala saat pengisian survei.

Proyeksi ke Depan

Proyeksi ke depan dalam mendukung pencapaian IKU C1.1, antara lain:

- 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas survei persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- 2. Pengembangan aplikasi survei persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dengan menambah fitur dan dalam rangka meningkatkan akurasi data hasil survei.
- 3. Penguatan pemantauan pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dokumentasi



INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE



Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana dalam Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien.

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset BMN meliputi :

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- Pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN
- Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian pemindahtanganan, pemusnahan penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian BMN.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diuku melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU):



Analisis IKU B1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu

Deskripsi IKU

Penerapan *good governance* dalam tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) mempunyai peranan besar dalam APBN. Amanat Pasal 44 UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) disusun meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas 4 (empat) parameter utama dengan 8 sub parameter.

Setiap sasaran strategis mempunyai penjelasan dan masing-masing memiliki 2 parameter antara lain sebagai berikut:

Infografis 11 Parameter Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset



Indikator IPA tersebut menggunakan prinsip-prinsip umum antara lain dilakukan secara mandiri, menggunakan sumber data yang terbuka, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan APIP K/L dengan periode yang telah ditentukan, serta indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks dengan skala 1-4 sebagai berikut:

Tabel 20 Kategori dan skala likert Indeks Pengelolaan Aset

Indeks/Skala	Kategori
1	Buruk
2	Cukup
3	Baik
4	Sangat Baik

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ini menjadi IKU level Kemenlu-wide sejak tahun 2021. Hal ini disebabkan IKU tersebut menjadi salah satu elemen yang penting dalam penguatan infrastruktur diplomasi sesuai yang digariskan di dalam Renstra 2020-2024 dan prioritas polugri 4 + 1, disamping IPA merupakan salah satu aspek antara reformasi birokrasi sesuai PermenPANRB No. 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil dari IPA dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata Kelola BMN serta berbagai upaya-upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, IPA Kemenlu ini dilakukan secara terpusat dan dinilai oleh Kementerian Keuangan.

Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

Realisasi IKU B1.1 diperoleh dengan menggunakan formula:

Informasi Kinerja

Pada umumnya output dari kegiatan-kegiatan dalam IKU ini telah terlaksana dengan baik. Capaian IKU di tahun 2023 sebesar 2,91 terdiri atas parameter sebagai berikut:

Tabel 21 Capaian Kinerja IKU B1.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Indesk
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu	Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	
Realisasi		2,91
Target		2,90 dari 4
Capaian		100,34

Realisasi IKU B1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu yang diperoleh tahun 2023 yaitu sebesar 2,90 dimana Kemenlu merencanakan nilai IPA dengan target 2,90 dengan realisasi per 31 Desember 2023 mencapai 2,91 atau 100,34%. Data capaian IKU ini diperoleh dari hasil capaian secara terpusat, yaitu di level Kemenlu (sesuai dengan target nilai IPA yang tertera di dalam DIPA Kementerian Luar Negeri TA 2023).

Perbandingan Kinerja

Mengingat IKU ini baru diadopsi pada tahun 2022, perbandingan realisasi kinerja termasuk target dan capaiannya baru dapat dibandingkan dengan 1 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 22 Perbandingan Capaian IKU B1.1 Tahun 2022-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
B1.1	2,7 dari 4	2,86	105,93%	2,90 dari 4 ↑	2,91 ↑	100,34%

Dibanding tahun sebelumnya, realisasi IKU naik sebesar 0,05 poin dan mencapai target yang ditetapkan. Capaian IKU B1.1 menunjukkan adanya kenaikan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan target yang lebih tinggi. Dalam hal ini, target ditetapkan secara menantang, realistis dan achievable dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Capaian kinerja untuk IKU B1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang berada di atas target merupakan implikasi dari upaya perbaikan pengelolaan aset yang dilakukan di lingkungan Kemenlu, termasuk unit organisasi dan unit kerja di bawahnya. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu merupakan IKU Kementerian yang *cascading* ke semua IKU Unit Organisasi level Eselon I dan Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selain itu, nilai IPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai realisasi IKU tersebut merupakan nilai untuk level kementerian dan nilai tersebut tidak diturunkan ke level Unit Organisasi dan Unit Kerja. Hal tersebut menyebabkan realisasi dan capaian IKU Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu tidak mencerminkan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam pengelolaan asetnya.

Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU oleh Kemenlu, antara lain:

1. Beberapa Perwakilan belum melakukan pelabelan dan pemutakhiran BMN sehingga seringkali menjadi temuan pemeriksa.
2. Beberapa Perwakilan tidak mengirimkan wasdal tepat waktu; dan belum adanya aturan yang jelas terkait penetapan kurs pada modul persediaan dan aset pada aplikasi SAKTI. Selain itu tingkat pemahaman pengelola BMN belum sama pada tiap satuan kerja.
3. Bagi Set.Itjen, pengukuran IKU ini belum dapat mencerminkan secara khusus kinerja unit organisasi/unit kerja dan perwakilan dalam pengelolaan aset dikarenakan IKU digunakan untuk mengukur pengelolaan aset pada tingkat kementerian.

Upaya Perbaikan

Sejumlah langkah solutif yang diambil untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai IKU adalah:

1. Melakukan pendampingan bagi Perwakilan yang membutuhkan terkait pengelolaan BMN.
2. Melakukan monitoring secara berkala dan melakukan pendampingan bagi Perwakilan yang mengalami kesulitan dalam penyusunan wasdal.
3. Melakukan koordinasi dengan BPO (Biro Perencanaan dan Organisasi) selaku Manajer Kinerja Organisasi dan Perwakilan (MKOP) untuk menelaah kembali penjenjangan IKU.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dikarenakan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu merupakan IKU Kementerian yang *cascading* ke semua IKU Unit Organisasi level Eselon I dan Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal serta merupakan IKU baru diadopsi di tahun 2022 dimana dalam realisasinya mencerminkan secara langsung kinerja di tingkat kementerian, maka program yang mendukung disesuaikan dengan hasil analisis Biro Umum, Kemenlu yang menjadi koordinator IKU L2.1 di tingkat kementerian.

Sejumlah program pendukung:

1. Pelaporan penggunaan dan pengamanan asset negara yang dilakukan setiap semester.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baik di Kemenlu dengan memperkuat peran Itjen selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik di Kemenlu. Terkait pengawasan dan pengendalian BMN, Itjen telah berkontribusi dalam

meningkatkan kualitas pengendalian BMN melalui kegiatan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Dalam hal ini, Itjen telah melaksanakan kegiatan reviu RKBMN tahun 2024, tanggal 20 s.d 24 November 2023. Sebagai hasil reviu, dicapai hasil RKBMN yang sesuai dengan kebutuhan, baik di Pusat maupun di Perwakilan.

Proyeksi ke Depan

Langkah perbaikan yang akan dilakukan Kemenlu c.q. Biro Umum selaku koordinator pengelolaan aset Kemenlu baik di Pusat dan Perwakilan RI, di antaranya:

1. Melakukan bimtek dan sosialisasi terkait pengelolaan BMN;
2. Melakukan bimtek dan sosialisasi terkait aplikasi SAKTI, khususnya modul persediaan modul aset; dan
3. Melakukan pendampingan terhadap satuan kerja yang mempunyai kendala dalam hal pengelolaan BMN.
4. Terkait dengan penggunaan IKU IPA pada tingkat Kementerian untuk mengukur IPA pada tingkatan Unit Organisasi Eselon I, maka sebagai proyeksi ke depan atas pengukuran yang berbeda tingkatan tersebut, Set.Itjen kembali menyampaikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan pengukuran IKU tersebut. Dalam kaitan ini, Biro Perencanaan dan Organisasi selaku koordinator dalam pengelolaan kinerja di Kemenlu dan Biro Umum selaku pengampu IKU IPA perlu melakukan *revisit* IKU Indeks Pengelolaan Aset di level Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang melaksanakan IKU tersebut di level teknis, termasuk unit kerja serupa, yakni Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan.

Dokumentasi



Sasaran Strategis (SS): B2

**Meningkatnya
Pengelolaan Anggaran
yang Optimal dan
Akuntabel pada
Inspektorat**



Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal (paling baik dan tertinggi) dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU B2.1

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

IKU ini mengukur upaya Itjen dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran Kementerian Luar Negeri serta untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Inspektorat Jenderal

Analisis IKU B2.1. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Deskripsi IKU

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui aplikasi monev anggaran (SMART).

Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri dari evaluasi atas aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kriteria NKA pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tugas kerja berupa keluaran (output) dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Variabel yang diukur adalah:

1. Capaian Sasaran Program
2. Penyerapan
3. Konsistensi
4. Capaian Output Program
5. Efisiensi
6. Nilai efisiensi
7. Rata-rata NKA Satker

Terdapat 3 komponen pada indikator anggaran, sebagai berikut

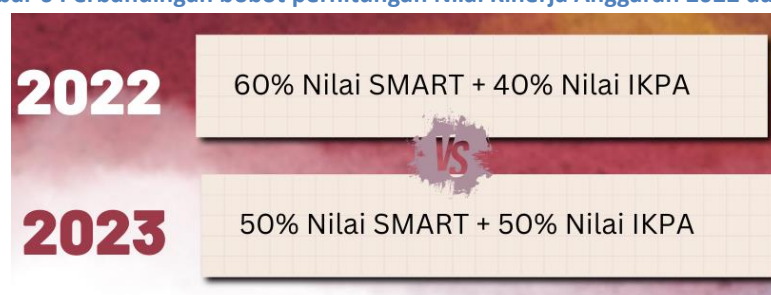
Infografis 12 Komponen Indikator Anggaran



Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merujuk pada PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja K/L untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam rangka penanjanan IKU dan sesuai ketentuan nasional, formula IKU mengalami sedikit perubahan dibanding tahun sebelumnya yakni perbedaan pembobotan sebagai berikut:

Gambar 6 Perbandingan bobot perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2022 dan 2023



Informasi Kinerja

Berdasarkan data nilai SMART dan nilai IKPA per tanggal 15 Januari 2024, realisasi NKA Itjen TA 2023 adalah sebesar 94,84. Dengan target 93, capaian IKU B2.1. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 adalah sebesar 101,98%.

Tabel 23 Capaian IKU B2.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai Kinerja Anggaran Itjen	Nilai SMART 50%	46,08
	Nilai IKPA 50%	48,76
Realisasi		94,84
Target		93
Capaian		101,98%

Perbandingan Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2022), yakni turun 2,6 poin. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam PK, terdapat peningkatan nilai NKA pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, terdapat perbedaan rumus IKU dibanding tahun sebelumnya, yakni perubahan bobot yang sebelumnya, sehingga terdapat indikasi bahwa realisasi kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU di tahun 2023.

Tabel 24 Perbandingan Capaian IKU B2.1 Tahun 2020-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
B2.1	90	86,24	95,83 %	91 ↑	96,42 ↑	105,96%	92 ↑	96,22 ↓	104,58%	93 ↑	94,84 ↓	101,98%

Jika dibandingkan dengan proyeksi target jangka menengah yang tertera pada Renstra Set.Itjen 2020 – 2024 Realisasi IKU B2.1 Nilai Kinerja Anggaran Itjen tahun 2023 yaitu 94,84 telah melampaui target renstra Set.Itjen tahun 2020-2024 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90. Dengan pencapaian realisasi di tahun 2023 yang melampaui target tersebut, target IKU ini untuk tahun 2024 dapat disesuaikan lagi dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target PK 2023	Proyeksi Target Renstra		Rencana Target PK 2024
			2023	2024	
IKU B2.1 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	94,84	93	90	90	94
Tingkat <i>on the track</i> target Renstra dengan realisasi 2023			105,38%	105,38%	100,89%

Dengan demikian, proyeksi target jangka menengah selanjutnya (2024) akan disesuaikan mengingat capaian kinerja IKU sudah melampaui. Proyeksi target IKU tahun 2024 (periode tahun terakhir Renstra 2020 - 2024 adalah 94.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan Itjen dalam mencapai target IKU B.2.1 merupakan implikasi dari upaya perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan anggaran, baik pada saat perencanaan anggaran, termasuk proses revisi di tahun berjalan dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Meskipun pada tahun 20223, NKA Itjen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini terkait dengan realisasi capaian ouput pada triwulan awal belum maksimal, namun pada akhir tahun realisasi anggran Itjen mencapai 100% dan capaian ouput 100%. Selama tahun 2023 beberapa kali dilakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kondisi dan kegiatan *pop-up* yang tidak direncanakan sebelumnya, serta terdapat 2 (dua) kali perolehan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Kendala dan Tantangan

1. *Pop-up* kegiatan yang muncul tidak sesuai dengan perencanaan.
2. Adanya penyerapan anggaran cukup signifikan di awal tahun tetapi dengan capaian output kurang maksimal, dikarenakan output yang dihasilkan adalah kegiatan audit di Perwakilan. Hal ini berdampak tingkat efisiensi yang menjadi minus.
3. Penilaian atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh pihak luar yaitu Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga penginputan data nilai kinerja anggaran bergantung pada pihak luar dalam menyuplai data serta sulit memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan anggaran dan kinerja, sehingga kualitas perencanaan di masa mendatang dapat ditingkatkan;
2. Melakukan evaluasi kinerja dan anggaran dengan berkoordinasi dengan BPO (Biro Perencanaan dan Organisasi) selaku Manajer Kinerja Organisasi dan Perwakilan (MKOP). Hal ini diperlukan untuk memastikan efisiensi NKA Itjen menuju ke angka positif.
3. Melakukan monitoring input data SMART sesuai tenggat waktu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian IKU ini selain secara rutin melaporkan dokumen PJ keuangan sesuai data dan pengeluaran anggaran, juga dilakukan penginputan data realisasi pada aplikasi keuangan Kementerian Keuangan yakni aplikasi SMART dan SAKTI secara rutin dan tepat waktu. Rincian

kegiatan pendukung capaian IKU, antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Anggaran Itjen.
2. Evaluasi pelaksanaan anggaran.
3. Evaluasi kegiatan verifikasi dan validasi dokumen keuangan.
4. Penyusunan RKAKL TA 2024
5. Penyusunan revisi DIPA.

Proyeksi ke Depan

Untuk proyeksi ke depan, akan terus ditingkatkan:

1. Koordinasi dan komunikasi di antara pengelola anggaran dan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, baik pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, maupun seluruh Inspektorat Wilayah.
2. Memastikan keseimbangan pencapaian realisasi anggaran dengan realisasi capaian output, sehingga diharapkan efisiensi anggaran Itjen berada di angka positif di tiap triwulan.

Dokumentasi



Sasaran Strategis (SS): B3

**Dukungan Analisis
Pengawasan yang
Berkualitas**



Dukungan adalah sesuatu yang didukung, sokongan, bantuan.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Berkualitas adalah mempunyai kualitas, bermutu (baik)

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU B3.1

Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

IKU ini mengukur tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan guna mendorong penyelesaian temuan pengawasan internal dan eksternal

Analisis IKU B3.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Deskripsi IKU

Tingkat adalah tinggi rendahnya kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban dan sebagainya.

Kemutakhiran adalah hal yang berhubungan dengan mutakhir yang memiliki makna terakhir, terbaru.

Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh lewat pengamatan atau pencarian sumber-sumber kredibel.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah laporan hasil audit Inspektorat Jenderal atau laporan hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti.

Realisasi IKU B3.1 dihitung dengan menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{Jumlah isu tindak lanjut hasil pengawasan yang berhasil difasilitasi penyelesaiannya}}{\text{Jumlah isu tindak lanjut hasil pengawasan yang perlu difasilitasi}} \times 100\% \right)$$

Informasi Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, target IKU B3.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah 95% dengan realisasi 95,57% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100,60%.



Data Tindak Lanjut Hasil pengawasan dalam hal ini mencakup data tindak lanjut terhadap:

1. Laporan hasil audit APIP
2. Laporan hasil pemeriksaan BPK.
3. Pemutakhiran data kasus kepegawaian,
4. Rekonsiliasi data Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Tabel 25 Capaian IKU B3.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah isu tindak lanjut hasil pengawasan yang berhasil difasilitasi penyelesaiannya	6.996
	Jumlah isu tindak lanjut hasil pengawasan yang perlu difasilitasi	6.686
Realisasi		95,57%
Target		95%
Capaian		100,60%

Perbandingan Kinerja

IKU B3.1 “Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan” baru diadopsi di tahun 2022, sehingga capaian IKU hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022). Realisasi IKU B3.1 tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,66 poin dibanding di tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian IKU tahun sebelumnya yang belum mencapai target, terdapat penurunan target IKU sebesar 5 poin yakni dari 100% menjadi 95%.

Tabel 26 Perbandingan IKU B3.1 Tahun 2022-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
B3.1	T	R	C	T	R	C
	100%	93,91%	93,91%	95 ↓	95,57% ↑	100,60%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

IKU B3.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan merupakan IKU yang baru diimplementasikan di tahun 2022. Sebelumnya, selama 4 tahun terakhir, IKU yang berada di bawah Sasaran Strategis Dukungan Analisis Pengawasan yang Berkualitas ini telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Berdasarkan evaluasi internal terhadap penggunaan IKU tersebut di

tahun-tahun sebelumnya, terdapat sejumlah kelemahan dan kendala baik dalam penerapan maupun pencapaian IKU tersebut.

Pada tahun 2023, Set.Itjen dapat mencapai target kinerja pada IKU yang disebabkan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dalam perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
2. Koordinasi intensif terhadap perkembangan pendataan tindak lanjut hasil pengawasan, di antaranya dengan dilakukan kegiatan rapat bulanan (bagi Auditor dan Satuan Kerja).
3. Pemantauan data tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dengan memanfaatkan aplikasi SIPIK 2,0 dan SIPTL.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala dan tantangan dalam pencapaian IKU B3.1, sebagai berikut:

1. Sebagian besar input pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan setelah *entry briefing* pada akhir Desember 2023.
2. Sejumlah rekomendasi memerlukan telaah lebih lanjut dan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah. Dalam hal ini, kendala waktu dan proses tindak lanjut masih dalam proses serta jumlah SDM Auditor membatasi efektivitas koordinasi atas rekapitulasi/pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Sebagian besar rekomendasi yang difasilitasi untuk ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Kemenlu.

Upaya Perbaikan

1. Memaksimalkan pelaksanaan rapat bulanan (bagi Auditor dan Satker) yang difasilitasi oleh Set.Itjen terkait TLHP BPK mengingat SIPTL terbuka setiap saat.
2. Memantau informasi dari BPK sesuai hasil revidi Pimpinan.
4. Melakukan monitoring atas TL atas rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Untuk memenuhi IKU dimaksud, Set.Itjen sesuai tugas dan fungsinya melakukan sinergi antarSatker terkait data dan informasi hasil pengawasan melalui :

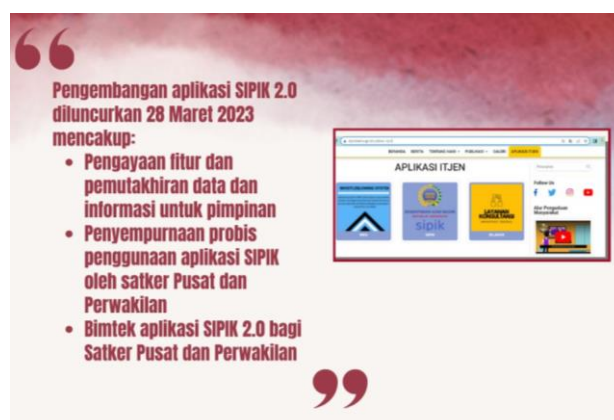
1. Kegiatan pemutakhiran data kasus, pemantauan tindak lanjut keputusan TPKN, rekonsiliasi data TP/TGR, dan penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Semester I dan Semester tahun 2022 beserta tindak lanjutnya (TL).

2. Kegiatan pemutakhiran data juga mencakup rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP Semester I dan Semester II meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP Triwulan I dan Triwulan II melalui masukan dari tiap seluruh Inspektorat Wilayah, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan III pada tanggal 3 - 4 Oktober 2023 di Pusdiklat, Kemlu, Senayan dan Triwulan IV melalui masukan dari seluruh Inspektorat Wilayah serta pendataan seluruh temuan dan rekomendasi dalam aplikasi SIPIK yang dapat dipantau oleh auditi untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut.
3. *Sotf launching* aplikasi SIPIK 2,0 yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023. Aplikasi SIPIK 2,0 memuat:
 - a. Pengayaan fitur dan pemuktahiran data dan informasi untuk pimpinan
 - b. Penyempurnaan proses bisnis penggunaan aplikasi SIPIK oleh Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI

Proyeksi ke Depan

Sejumlah proyeksi ke depan untuk dapat meningkatkan capaian IKU dan mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Sinergitas antar satker terkait data dan informasi hasil pengawasan akan terus ditingkatkan.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi terkait rekonsiliasi data, melalui aplikasi SIPIK menjadi versi 2.0 yang memuat beragam fitur input dan output dengan informasi yang lebih detail dan terkategori dengan baik.
3. Memperkuat koordinasi internal dalam rangka pemuktahiran data tindak lanjut hasil pengasasan intern dan ekstern.



Dokumentasi



Sasaran Strategis (SS): B4

**Dukungan Peningkatan
Kapabilitas APIP,
serta Layanan
Administrasi dan
Teknis yang Optimal
pada Inspektorat
Jenderal**



Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Layanan Administrasi merupakan layanan yang berhubungan dengan tata persuratan dan kegiatan kearsipan. Layanan teknis adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU B4.1

Indeks dukungan peningkatan kapabilitas APIP

IKU ini mengukur dukungan fasilitasi peningkatan kapabilitas APIP

IKU B4.2

Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal

IKU ini mengukur layanan administrasi dan teknis yang diberikan Sekretaris Inspektorat Jenderal

Analisis IKU B4.1 Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP

Deskripsi IKU

Sesuai Peraturan BPKP No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik.

Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal.

Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas.

Pencapaian IKU ini meliputi pelaksanaan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan dan bimtek untuk APIP dan pegawai Inspektorat Jenderal.
2. Penyempurnaan manajemen organisasi dan kelembagaan.
3. Penyusunan pedoman dan peraturan di bidang pengawasan.

Realisasi IKU B4.1 dihitung dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi dalam persentase} &= (\text{Jumlah dukungan fasilitasi peningkatan kapabilitas} \\ &\text{APIP yang berhasil dilakukan} / \text{Jumlah dukungan fasilitasi peningkatan kapabilitas} \\ &\text{APIP yang direncanakan}) \times 100\% \\ \text{Nilai indeks} &= 3 \times \text{realisasi dalam persentase} + 1 \end{aligned}$$

Informasi Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, target IKU B4.1 Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP adalah 3,5 (skala 4) dengan realisasi 4 sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 114,29%.

IKU B4.1 Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan IKU yang baru diimplementasikan sejak tahun 2022 untuk mendukung IKU Inspektorat Jenderal Level Kapabilitas APIP. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga/Daerah, penilaian mandiri kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) dilakukan setiap tahun sehingga diharapkan IKU realisasi IKU dapat mendorong peningkatan kapabilitas APIP, serta memperbaiki nilai IACM-nya yang sejak tahun 2019 berada pada level 3.

Tabel 27 Capaian IKU B4.1

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dukungan fasilitasi peningkatan kapabilitas APIP yang berhasil dilakukan	71
	Jumlah dukungan fasilitas peningkatan kapabilitas APIP yang direncanakan	71
Realisasi		4
Target		3,5 (skala 4)
Capaian		114,29%

Perbandingan Kinerja

IKU B4.1 “Indeks Dukungan Peningkatan Kapabilitas APIP” baru diadopsi sejak tahun 2022, sehingga capaian IKU hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022). Realisasi IKU B4.1 tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,32 poin dibanding di tahun sebelumnya yakni dari 3,68 menjadi 4. Berdasarkan capaian IKU tahun sebelumnya, terdapat kenaikan target IKU sebesar 0,5 poin yakni dari 3 (skala 4) menjadi 3,5 (skala 4).

Tabel 28 Perbandingan IKU B4.1 Tahun 2022-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
B4.1	T	R	C	T	R	C
	3 (skala 4)	3,68	122,67 % (melebihi batas toleransi 120%)	3,5 (skala 4) ↑	4 ↑	114,29%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan Set.Itjen dalam merealisasikan target IKU B4.1 disebabkan sebagai berikutL

1. Dukungan dari unit kerja terkait, termasuk Pusdiklat, dalam penyelenggaraan Bimtek peningkatan kapabilitas APIP Kemenlu.

2. Penyesuaian program kegiatan peningkatan kapasitas SDM Itjen dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang transparan dan akuntabel dan berbasis risiko.
3. Penataan aspek manajemen organisasi dan penyusunan pedoman pengawasan yang sesuai dengan tantangan perubahan dan dinamika organisasi.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Set.Itjen dan Itjen.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala masih dihadapi, di antaranya:

1. Belum memadainya jumlah SDM dalam mendukung intensitas pelaksanaan kegiatan pengawasan yang relatif tinggi sepanjang tahun.
2. Tingginya tingkat mutasi juga menyebabkan keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun pengetahuan/*skill* terkait kegiatan pengawasan, sehingga menyebabkan sejumlah rencana kegiatan tertunda seperti penyusunan pedoman dan peraturan pengawasan.

Upaya Perbaikan

Sejumlah upaya perbaikan yang telah dilakukan:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal berupaya untuk mengisi posisi yang kosong dengan SDM baru (baik CPNS maupun yang mutasi ke Pusat)
2. Mendorong SDM Itjen untuk meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek/pelatihan terkait pengawasan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Guna mendukung penguatan kapabilitas APIP yang sejak tahun 2019 berada di level 3, selama tahun 2023, Set.Itjen telah melakukan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan manajemen organisasi dan kelembagaan, mencakup:
 - Penyampaian masukan Revisi Permenlu No. 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenlu khususnya OTK Sekretariat Itjen.
 - Penyampaian saran perubahan/penambahan peta jabatan termasuk JFD Madya untuk membantu Inspektur Wilayah.
 - Penyusunan standard operational procedure (SOP) terkait layanan konsultasi Itjen, pemanfaatan aplikasi SIPIK dan WBS.
2. Penyusunan pedoman dan peraturan di bidang pengawasan, meliputi sejumlah deregulasi

kebijakan pengawasan dan penetapan tim/pokja pendukung kegiatan pengawasan, antara lain:

- RPermenlu Perubahan Permenlu 1/2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenlu
 - RPermenlu Perubahan Permenlu 6/2015 tentang Benturan Kepentingan di Kemenlu
 - Kepirjen No. 00275/B/PW/02/2023/67/11 tanggal 28 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Kemenlu TA 2023
 - Kepirjen No 01031/B/PW/07/2023/67/11 tanggal 10 Juli 2023 tentang Tim Penguatan Kapabilitas APIP Kementerian Luar Negeri Tahun 2023
 - Kepirjen No. 00180/B/PW/01/2023/67/11 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022
 - Kepirjen No 00651/B/PW/05/2023/67/11 tanggal 30 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
 - Kepirjen No 00178/B/PW/01/2023/67/11 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023
 - Kepirjen No 01317/B/PW/08/2023/67/11 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi di Perwakilan Republik Indonesia
 - Kepirjen No 00742/B/PW/05/2023/67/11 tanggal 29 Mei 2023 tentang Kepirjen tentang Pembentukan Tim Penguatan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2023
 - Kepirjen No 26791/B/PW/06/2023/67/11 tanggal 30 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK pada Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023
 - Kepirjen 01495/B/PW/12/2023/67/11 tanggal 1 Desember 2023 tentang Tim Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023.
 - Juklak/00001/PW/01/2023/67/11 tanggal 5 Januari 2023 tentang Petunjuk Teknis tentang Administrasi Keuangan, BMN, dan kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
3. Pemantauan penerapan manajemen risiko, mencakup seluruh dokumen manajemen risiko mulai dari dokumen Risk Register dan Rencana Penanganan Risiko (RR RPR) dan Laporan

Penanganan Risiko di lingkungan Itjen, serta pelaksanaan reviu RR RPR sebagai bahan pengawasan intern berbasis risiko.

4. Pelatihan dan bimtek untuk APIP dan/atau seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, meliputi:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Pertama, 13-27 Februari 2023 (e-learning) dan 6-21 Maret 2023
 - Pelatihan Kantor Sendiri: "Peran APIP dalam Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Luar negeri, 1-2 Maret 2023
 - Bimbingan Teknis Pengisian Kertas Kerja Elektronik Evaluasi AKIP, 11 April 2023
 - Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, 12-14 Juli 2023
 - Workshop Audit Investigatif bagi Pimpinan APIP, 11-13 Agustus 2023
 - Bimbingan Teknis Pengisian e-kinerja bagi Pegawai Inspektorat Jenderal, 14-15 Agustus 2023
 - Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Expert (CGAE), 20-25 Agustus 2023
 - Pelatihan dan Sertifikasi IT Auditor, 21-27 Mei 2023
 - Pemantapan Substansi Itjen bagi BPKRT yang akan ditugaskan pada Perwakilan RI Periode Mutasi Maret 2023, 9 Maret 2023
 - Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya, 11-19 September 2023 (e-learning) dan 29 Sep-6 Oktober 2023 (tatap muka)
 - Pendidikan dan Pelatihan CGAE - Sertifikasi Certified Governance Accounting Expert, 18-21 September 2023
 - Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi, 13 Oktober 2023
 - Workshop Pemanfaatan Forensik Digital dan Analisis Data bagi APIP Kementerian/Lembaga, 10-13 Oktober 2023
 - Program Pelatihan Jarak Jauh Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bagi Kementerian/Lembaga, 13-17 November 2023
 - Bimbingan Teknis Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, 20-22 November 2023
 - Bimtek Penerapan Jabatan Fungsional Auditor, 5-7 Desember 2023

Proyeksi ke Depan

Sekretariat Inspektorat Jenderal akan mendukung peningkatan kapabilitas APIP yang searah dengan catatan dan rekomendasi BPKP terhadap hasil Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP 2022/2023

yang mencakup di antaranya:

1. Penyusunan Peta kompetensi APIP Kementerian Luar Negeri yang dapat memonitor realisasi rencana diklat seluruh pegawai dan menganalisis realisasi jam pelatihan minimal setahun masing-masing pegawai
2. Koordinasi kegiatan evaluasi atas efektivitas kegiatan Itjen dalam mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut selama tiga tahun berturut-turut
3. Fasilitasi penyusunan Kebijakan penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan Kementerian Luar Negeri.
4. Fasilitas update pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai kondisi APIP terkini.

Dokumentasi





**BIMBINGAN TEKNIS
PENGISIAN KERTAS KERJA EVALUASI AKIP**
Jakarta, 11 April 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**PELATIHAN:
PERAN APIP DALAM
MENINGKATKAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER**
Jakarta, 1-2 Maret 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN E-KINERJA
PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
Jakarta, 14-15 Agustus 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**WORKSHOP AUDIT INVESTIGATIF
BAGI PIMPINAN APIP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
Depok, 11-13 Agustus 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**BIMBINGAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
Jakarta, 13 Oktober 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**BIMBINGAN TEKNIS
REVIU PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN**
Jakarta, 20-22 Oktober 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
Jakarta, 4-8 Desember 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id



**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI LUAR NEGERI TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN PERWAKILAN RI**
Jakarta, 14-16 Desember 2023

itjen.kemlu

itjen.kemlu.go.id

Analisis IKU B4.2 Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal

Deskripsi IKU

Layanan Administrasi dalam IKU ini merupakan layanan yang berhubungan dengan tata persuratan dan kegiatan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain itu, layanan teknis mencakup kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan Itjen.

IKU B4.2 bertujuan untuk mengukur layanan administrasi dan teknis yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Itjen sesuai dengan tugasnya secara optimal.

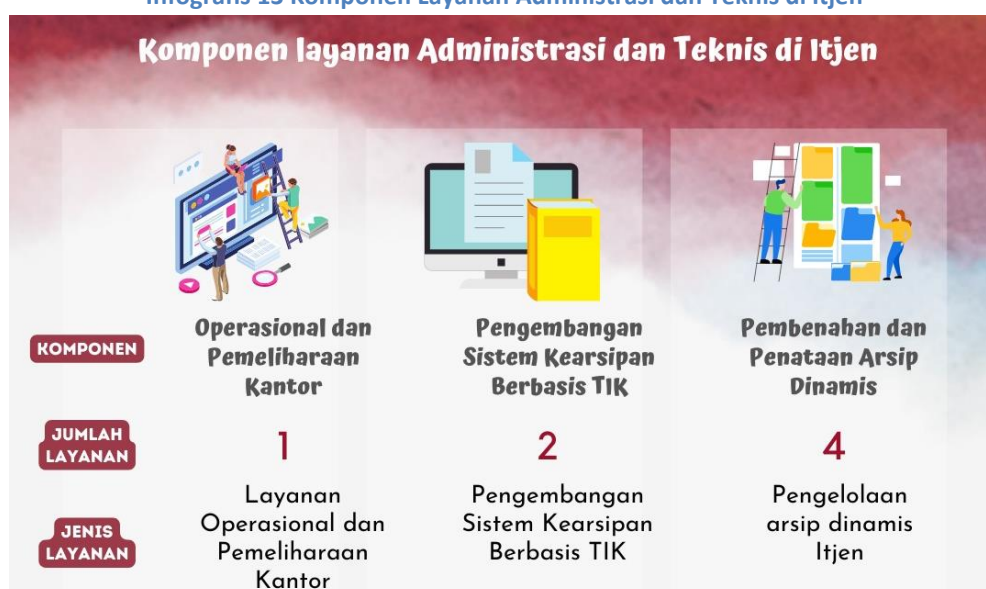
Realisasi IKU B4.2 dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Realisasi dalam persentase} = (\text{Jumlah layanan yang diberikan} / \text{Jumlah layanan yang direncanakan}) \times 100\%$$
$$\text{Nilai indeks} = 3 \times \text{realisasi dalam persentase} + 1$$

Informasi Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, target IKU B4.2 Indeks Dukungan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal adalah 3,50 (skala 4) dengan realisasi 4, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 114,29%.

Infografis 13 Komponen Layanan Administrasi dan Teknis di Itjen



Tabel 29 Capaian IKU B4.2

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal	Jumlah layanan yang diberikan	7
	Jumlah layanan yang direncanakan	7
Realisasi		4
Target		3,50 (skala 4)
Capaian		114,29%

Perbandingan Kinerja

IKU B4.2 “Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal” baru diadopsi sejak tahun 2022, sehingga capaian IKU hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022). Realisasi IKU B4.2 tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,43 poin dibanding di tahun sebelumnya yakni dari 3,57 menjadi 4. Berdasarkan capaian IKU tahun sebelumnya, terdapat kenaikan target IKU sebesar 0,5 poin yakni dari 3 (skala 4) menjadi 3,5 (skala 4).

Tabel 30 Perbandingan IKU B4.1 Tahun 2022-2023

Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2022			2023		
B4.2	T	R	C	T	R	C
	3 (skala 4)	3,57	119%	3,5 (skala 4) ↑	4 ↑	114,29%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Penggunaan IKU Indeks Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis di Inspektorat Jenderal sejak tahun 2022, merupakan hasil evaluasi internal yang dilakukan Set.Itjen. IKU tersebut ditujukan untuk mengukur kinerja terkait dukungan administrasi dan teknis yang dilakukan unit kerja Set.Itjen dengan alokasi anggaran BBO yang ada dalam DIPA. Melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan yang

baik dan kemampuan dalam melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap prioritas kegiatan di tahun berjalan, Set.Itjen mampu melakukan pemberian dukungan layanan teknis dan administrasi yang maksimal, termasuk dengan adanya kegiatan yang bersifat *pop up*.

Berhasilnya capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan didukung utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai audit kearsipan internal dilakukan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP) selaku Unit Kearsipan I Kemenlu. Berdasarkan hasil laporan audit kearsipan bahwa penyeelenggaraan kearsipan di lingkungan Set.Itjen selaku Unit Kearsipan II secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 88,51 (Memuaskan).

Sistem kearsipan yang baik di Set.Itjen juga ditandai dengan diraihnya juara III Unit Kearsipan Terbaik Tahun 2023 di Kemenlu RI. Capaian ini menjadi indikasi adanya peningkatan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dan sebagai alat bukti yang sah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Itjen.

Faktor pendukung lainnya atas keberhasilan capaian IKU antara lain:

1. Penataan arsip inaktif di Set.Itjen telah berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan asas aturan asli (*principle of original order*).
2. Set.Itjen telah melakukan pengaturan fisik arsip inaktif dalam rangka pemenuhan kembali arsip inaktif.
3. Set.Itjen sudah menyusun daftar arsip inaktif berdsasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari Unit Pengeloa.

Kendala dan Tantangan

Terdapat kendala yang dihadapi Set.Itjen dalam mencapai IKU B4.2, antara lain:

1. Terbatasnya SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Itjen. Dalam hal ini, Itjen memiliki 5 unit pengolah dan 1 unit kearsipan dengan hanya memiliki 4 JF Arsiparis.
2. Terdapat di antaranya 2 JF Arsiparis yang akan memasuki masa purnabakti.
3. Tingginya mutasi pegawai termasuk JF Arsiparis mengakibatkan perlunya adaptasi yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja kearsipan.

Upaya Perbaikan

Sebagai langkah solutif yang telah dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan keberadaan staf PPNPN sebagai pengelola arsip dengan penunjukan dalam suatu Surat Tugas.
2. Memetakan penambahan JF Arsiparis dalam rekrutmen P3K di lingkungan Itjen TA 2024.
3. Memetakan perlunya fasilitasi peningkatan kompetensi pegawai di bidang kearsipan melalui pendidikan dan latihan, dan atau bimbingan teknis.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam mendukung capaian IKU B4.2, Set.Itjen telah melakukan sejumlah kegiatan di antaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yakni berkoordinasi dengan Arsiparis BHAKP dan Pustik KP terkait akan diterapkannya Aplikasi SRIKANDI (aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam rangka pengelolaan persuratan di lingkungan Kemenlu
2. Pengelolaan arsip dinamis Itjen di antaranya melalui kegiatan pembuatan Daftar Arsip Usul Pindah dari Inspektorat Wilayah ke Sekretariat Inspektorat Jenderal Selaku Unit Kearsipan II, pembuatan Daftar Arsip Aktif Sekretariat Inspektorat Jenderal, pemindahan Arsip Inaktif Itjen Ke Records Center Kemenlu di Gedung Arsip Kemlu Kreo, dan pemusnahan Arsip Inaktif Itjen yang tidak memiliki nilai guna.
3. Layanan operasional dan administrasi kantor mencakup distribusi naskah dinas masuk dan keluar, dukungan strategi pimpinan, penelusuran naskah dinas dalam rangka temu balik arsip.

Proyeksi ke Depan

Sebagai proyeksi ke depan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Senantiasa memperbaiki dukungan layanan administrasi dan teknis.
2. Set.Itjen akan melakukan penajaman dan penguatan pelaksanaan tugas para pejabat fungsional, khususnya dengan terjadinya perampingan jabatan struktural yang sebelumnya menangani isu administrasi dan tugas teknis di lingkungan Set.Itjen.
3. Melakukan pemetaan pengelolaan kearsipan yang lebih baik seperti pembagian kerja yang lebih dinamis dan persiapan lebih matang dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan internal dengan target nilai yang lebih tinggi.



LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE



Sasaran Strategis (SS): L1

**Tata Kelola Organisasi
Sekretariat Inspektorat
Jenderal yang Baik**

Tata Kelola Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi. Hal ini merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi.

Tata kelola juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU):



IKU L1.1

Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

IKU ini mengukur sejauh mana Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Analisis IKU L1.1. Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Deskripsi IKU

Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengukur sejauh mana Itjen telah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen AKIP mencakup dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan dokumen evaluasi akuntabilitas internal.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemenlu dengan mengacu pada Keputusan Irjen No. No 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Kemenlu dan Perwakilan RI. Dalam hal ini, Set.Itjen sebagai salah satu unit kerja di Kemenlu turut dievaluasi atas implementasi sistem AKIP oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) III yang memegang desk Itjen.

Tabel 31 Klasifikasi Nilai AKIP

Predikat	Skor	Intepretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi IKU S1.2 dihitung dengan menggunakan rumus:

Informasi Kinerja

Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap dokumen AKIP Set.Itjen tahun 2022 oleh Inspektorat Wilayah III tanggal 4 Juli 2023, Nilai AKIP Set.Itjen mengalami peningkatan menjadi 79,90 (BB). Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 79,70 (BB) dengan capaian 100,25%. Peningkatan nilai AKIP Itjen tersebut menempatkan Set.itjen pada peringkat pertama pengelolaan akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon II tahun 2022.

Tabel 32 Capaian Kinerja IKU L1.1

Indikator Kinerja Utama		Informasi Kinerja	Nilai
Nilai AKIP Set.Itjen	Nilai AKIP Set.Itjen*		
Realisasi			79,90
Target			79,70
Capaian			100,25%

**Nilai AKIP yang digunakan adalah nilai tahun 2022 berdasarkan Penilaian dokumen AKIP Set.Itjen tahun 2022 dan 2023, sesuai evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2023.*

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 79,90 atau dengan kategori penilaian BB (Sangat Baik).

Tabel 33 Komponen Nilai AKIP Set.Itjen

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
PERENCANAAN KINERJA	30%	24,60
PENGUKURAN KINERJA	30%	25,20
PELAPORAN KINERJA	15%	11,85
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25%	18,25
HASIL NILAI EVALUASI AKIP	100%	79,90

Beberapa catatan positif dalam hasil evaluasi AKIP Itjen, antara lain:

Infografis 14 Catatan Positif Hasil Evaluasi AKIP Set.Itjen

- Set.Itjen telah melakukan evaluasi internal atas program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan, serta telah dilakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja untuk perbaikan di setiap periodenya. Kegiatan evaluasi internal tersebut berupa revisi atas renaksi atau berupa dialog kinerja yang telah dilakukan secara periodik (triwulan atau semesteran)



- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan
- IKU telah memenuhi kriteria SMART
- Dokumen Perencanaan telah selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan juga hingga tingkat individu
- Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.



Catatan Positif Hasil Evaluasi AKIP Set.Itjen



- Laporan Kinerja tahunan telah disusun dan disampaikan tepat waktu
- Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar



- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan menggunakan Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)
- Telah dilakukan pengukuran capaian kinerja individu dalam mendukung kinerja
- Dokumen Manual IKU berisi formula perhitungan IKU yang jelas dan relevan
- Dokumen Manual IKU berisi sumber data yang valid dan penyedia data yang jelas

Perbandingan Kinerja

Realisasi IKU L1.1 pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk tahun 2023 Nilai AKIP Set.Itjen mencapai 79,90 (BB). Perbandingan nilai AKIP Set.Itjen tersebut disajikan dalam table berikut:

Tabel 34 Perbandingan Capaian IKU L1.1 Tahun 2020-2023
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C)

IKU	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
S1.2	78	75,98	97,41%	79 ↑	77,69 ↑	98,34 %	79,5 ↑	78,51 ↑	98,75 %	79,70 ↑	79,90 ↑	100,25%

Jika dibandingkan dengan proyeksi target jangka menengah yang tertera pada Renstra Set.Itjen 2020 – 2024 Realisasi IKU L1.1 Nilai Evaluasi AKIP Set.Itjen tahun 2023 yaitu 79,90 telah selaras dengan target renstra Set.Itjen tahun 2020-2024 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81. Dengan pencapaian realisasi di tahun 2022 yang belum mencapai target renstra, target IKU ini untuk tahun 2024 dapat disesuaikan karena target proyeksi renstra yaitu 81 cenderung belum realistis dan *achievable*.

Tabel 35 Tingkat on the track Target Renstra dengan Realisasi 2023 IKU L1.1

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target PK 2023	Proyeksi Target Renstra	
			2023	2024
IKU L1.1 Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	79,90	79,70	81	82
Tingkat <i>on the track</i> target Renstra dengan realisasi 2023			98,64%	97,44%

Dengan demikian, proyeksi target jangka menengah selanjutnya pada periode 2020 - 2024 akan disesuaikan mengingat target kinerja IKU belum *achievable*. Proyeksi target IKU tahun 2024 menjadi:

Tabel 36 Proyeksi Target 2024 IKU L1.1

Indikator Kinerja Utama	Proyeksi Target sesuai Renstra	Proyeksi Target sesuai Capaian Kinerja 2023
	2024	2024
IKU L1.1 Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	82	80,01

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian IKU, antara lain:

1. Terus meningkatnya kualitas dokumen AKIP Set.Itjen mulai dari dokumen perencanaan, hingga dokumen pelaporan kinerja.
2. Peningkatan kualitas dokumen AKIP ditandai dengan adanya upaya Set.Itjen untuk menyajikan informasi kinerja secara lebih akuntabel dan komprehensif, serta memastikan adanya evaluasi internal yang baik dalam menetapkan IKU dan target kinerja.
3. Pengelolaan manajemen kinerja di lingkungan Set.Itjen didukung oleh SDM yang kompeten dengan ditandai adanya pelatihan yang memadai bagi para pengelola kinerja di lingkungan Set.Itjen.

Kendala dan Tantangan

Meskipun dari sisi capaian kinerja terdapat peningkatan Nilai AKIP Set.Itjen dari tahun ke tahun, namun Set.Itjen masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan kinerja, di antaranya:

1. Terbatasnya SDM yang ada di Itjen mengakibatkan pekerjaan SMKO dalam perencanaan, monev dan pelaporan kinerja yang terkadang dilakukan bersamaan pekerjaan kegiatan lainnya.
2. Cukup tingginya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Set.Itjen, sehingga cukup sering terjadi pergantian pengelola kinerja dan anggaran. Hal ini berpengaruh dalam proses penyusunan dokumen kinerja, khususnya Laporan Kinerja (LKj) yang perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap proses analisis data dan penyajian narasi yang dituangkan dalam laporan.

Upaya Perbaikan

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kinerja di lingkungan Itjen yang secara umum telah menunjukkan peningkatan secara signifikan, maka ke depan akan terus dilakukan penguatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tingkat unit kerja Eselon II, termasuk upaya perbaikan dalam pengelolaan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar-pengelola kinerja dan anggaran secara berkesinambungan untuk membahas *progress* dan hambatan yang dihadapi.
2. Pemantauan secara berkala terhadap *progress* pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dukungan program untuk mencapai kinerja IKU S1.2:

1. Perencanaan Kinerja:
 - Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan serta publikasi dokumen AKIP pada portal Kemenlu dan aplikasi ESR (Evaluasi SAKIP Reviu) KemenpanRB.
 - Pembahasan penyusunan dokumen perencanaan 2023 melibatkan seluruh pegawai Set.Itjen melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 24-27 Januari 2023.
 - Koordinasi dengan BPO selaku MKOP terhadap penetapan target IKU Set.Itjen 2023 dengan standar target IKU yang menantang, realitis dan achievable.
2. Pengukuran Kinerja:
 - Penyampaian evaluasi kinerja yang terukur dan berorientasi hasil melalui penetapan IKU berbasis BSC.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui aplikasi seperti e-Monev Bappenas, e-Kinerja Kemenlu 2,0 (AKSI), dan SMART Kemenkeu.
3. Pelaporan Kinerja:
 - Penyusunan Laporan Kinerja dengan memuat analisis capaian kinerja mencakup analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU, perbandingan kinerja, kendala/tantangan, upaya perbaikan dan proyeksi ke depan sesuai ketentuan.
 - Kegiatan penyusunan dan pembahasan LKj melibatkan seluruh pegawai Set.Itjen khususnya para pengelola kinerja melalui Kegiatan Penyusunan Konsep Awal LKj pada tanggal 18-22 Desember 2023.

- Publikasi LKj beserta dokumen AKIP lainnya pada portal Kemenlu dan aplikasi ESR (Evaluasi SAKIP Reviu) KemenpanRB.
 - Peyampaian LKj dan dokumen AKIP lainnya tepat waktu.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:
- Penyusunan Laporan Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP untuk perbaikan implementasi sistem AKIP. Laporan tindak lanjut telah disampaikan sebelum 1 November sesuai ketentuan.
 - Kegiatan monev kinerja dan anggaran mengundang seluruh pengelola kinerja secara berkala, dan kegiatan bilik Set.Itjen dengan BPO dalam rangka monev kinerja dan anggaran Kemenlu dan Perwakilan RI secara berkala.
 - Pelaksanaan Dialog Kinerja secara rutin yang dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan segenap pegawai guna membahas pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan strategi pencapaian kinerja secara optimal.



Proyeksi ke Depan

Target Set.Itjen adalah dapat terus meningkatkan nilai AKIP setiap tahunnya. Kenaikan nilai AKIP di

unit kerja dan Perwakilan tentunya mendukung nilai AKIP Kemenlu. Mengingat gap paling tinggi terdapat pada komponen “Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Internal”, maka Set.Itjen akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan frekuensi koordinasi antar pengelola kinerja di lingkungan Set.Itjen.
2. Peningkatan pemahaman pengelola kinerja melalui keaktifan para pengelola kinerja dalam senantiasa mengikuti bimtek terkait pengelolaan kinerja.
3. Kegiatan *transfer of knowledge* antar BPO dan Set.Itjen dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja agar perbaikan implementasi sistem AKIP berjalan selaras.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk penyempurnaan implementasi Sistem AKIP Set.Itjen ke depan. Sesuai dengan LHE Inspektorat Wilayah III terkait AKIP Set.Itjen 2022, beberapa telah ditindaklanjuti dalam tahun 2023 dan akan selesai ditindaklanjuti tahun 2024, antara lain:

Tabel 37 Tindak Lanjut Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Set.Itjen

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal perlu menetapkan target IKU secara lebih cermat dengan memperhatikan capaian kinerja sebelumnya dan perkembangan situasi internal dan eksternal dengan tetap memperhatikan target kinerja yang ditetapkan pada tingkatan Kemenlu untuk IKU yang sifatnya Direct Cascading. Pada tahun 2022, terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai target, yaitu IKU B3.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan IKU L1.1 Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal.	- Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan target IKU dengan merujuk kepada capaian kinerja sebelumnya dan perkembangan situasi internal dan eksternal dengan tetap memperhatikan target kinerja IKU yang ditetapkan pada tingkatan Kemenlu untuk IKU yang sifatnya Direct Cascading. - IKU direct cascading pada Set.Itjen adalah (i) Nilai Opini BPK; (ii) Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu; (iii) Nilai Kinerja Anggaran Itjen; (iv) Nilai AKIP Itjen. Target keempat IKU dimaksud ditetapkan merujuk pada penetapan target IKU di atasnya (Kemenlu dan/atau Itjen). - Untuk IKU yang tidak mencapai target di tahun 2022, Set.Itjen telah menetapkan target yang disesuaikan dengan perkembangan serta capaian sebelumnya agar target kinerja menjadi lebih menantang, namun tetap realistis dan achievable	Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024. Dokumen referensi saat penetapan target: - LKj Set.Itjen 2023 - PK Irjen 2024 - Renstra Set.Itjen 2020 - 2024

Dokumentasi



III.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, untuk kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Inspektorat Jenderal, Set.Itjen mendapatkan pagu awal sebesar . Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan 13 kali revisi pagu anggaran terkait penambahan/anggaran belanja tambahan (ABT). Pagu akhir Set.Itjen adalah sebesar

Set.Itjen telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2023 dengan realisasi mencapai 100% atau sebesar . Persentase realisasi tersebut meningkat sebanyak 0,02 poin jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2022, yaitu sebesar 99,98%.

Tabel 38 Pagu dan Realisasi Anggaran per jenis belanja Tahun 2023

Sumber: aplikasi SatuDJA 15 Januari 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Belanja Pegawai			
Belanja Barang			
Belanja Modal			

Semenjak pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.Itjen terus menurun setiap tahun. Namun, mulai tahun 2023, terdapat peningkatan pagu anggaran, seperti yang terlihat pada tabel perbandingan realisasi anggaran tahun 2020-2023 di bawah ini.

Tabel 39 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023



III.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sejumlah 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Inspektorat Jenderal dicapai untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dengan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Set.Itjen adalah 103,26 (Istimewa) dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 92,16 (sangat baik), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Data Realisasi Anggaran Per Rincian Output (RO)

No.	Rincian Output	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)			
2.	Layanan Perkantoran (Layanan)			
Total		5.569.213.000,00	5.569.204.110,00	100,00%

Catatan: Data realisasi anggaran menggunakan data monitoring per RO di aplikasi SMART yang ditarik per tanggal 15 Januari 2023.

Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, Set.Itjen secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat capaian kinerja serta kesesuaiannya dengan realisasi anggaran. Monitoring atas capaian kinerja dan realisasi anggaran secara periodik memungkinkan Set.Itjen untuk melakukan proyeksi terhadap Sisa Anggaran (SIAR) ataupun memantau kekurangan anggaran atas program/ kegiatan yang menjadi prioritas dengan segera melakukan upaya korektif melalui revisi/realokasi anggaran di tahun berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja selaras dengan pemanfaatan anggaran sampai dengan akhir tahun.

Sebagai hasil, persentase kinerja anggaran Set.Itjen adalah optimal dengan persentase 100% dan efisien dengan capaian kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 103,26. Mengingat

persentase capaian kinerja (103,26%) lebih besar daripada realisasi anggarannya (100%), Set.Itjen tergolong **efisien** dalam menggunakan anggarannya untuk mencapai target kinerja.

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Permenlu No. 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, kebutuhan formasi dan bezetting di Set.Itjen sebagai berikut:

Tabel 41 Data Pegawai Set.Itjen berdasarkan Formasi dan Bezetting Tahun 2023

Jenjang Jabatan	Formasi	Bezetting	Kekurangan
Kepala Bagian	4	4	0
Kepala Subbagian	12	9	3
Penata Kanseleraí Madya	4	0	4
Penata Kanseleraí Muda	8	6	2
Penata Kanseleraí Pertama	4	4	0
Pranata Informasi Diplomatik Muda	1	0	1
Pranata Informasi Diplomatik Muda	2	0	2
Arsiparis Madya	2	1	1
Arsiparis Muda	5	3	2
Arsiparis Pertama	6	0	6
Analís Keuangan	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Analís SDM Aparatur Penyelia	1	0	1
Analís Non Keahlian (Jabatan Fungsional Umum)	16	2	14
Jumlah	67 orang	31 orang (46%)	36 orang (54%)

Walaupun masih terdapat kekurangan jumlah SDM di Set.Itjen, yakni hanya terisi sebesar 46% dari formasi yang disediakan. Namun, target kinerja Set.Itjen masih dapat direalisasikan sesuai bahkan melebihi target yang ditentukan. Hal ini karena Set.Itjen juga merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 22 orang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Set.Itjen.

Upaya pengisian formasi jabatan tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja Set.Itjen secara keseluruhan. Spesialisasi jabatan juga telah dilakukan demi meningkatkan kualitas kinerja. Pemenuhan formasi jabatan yang diduduki oleh SDM merujuk pada analisis jabatan dan peta jabatan Set.Itjen.

Set.Itjen juga berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan cara menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, seperti program pendidikan pelatihan berjenjang untuk jabatan fungsional, mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan pelatihan bahasa, pelatihan untuk keahlian dan keterampilan tertentu, serta berbagai pelatihan yang dapat menunjang kinerja pegawai baik yang diselenggarakan oleh Set.Itjen maupun dari unit kerja lainnya di Kemenlu dan di luar Kemenlu.

Selama menjalankan tugas dan fungsi tahun 2023 kegiatan Set.Itjen masih dilaksanakan secara hybrid (tatap muka terbatas), namun hal tersebut tidak menghalangi Kemenlu beserta seluruh sumber daya manusia yang ada untuk tetap mencapai kinerja sesuai yang telah ditargetkan. Lebih lanjut dengan jumlah SDM yang ada dan dengan hasil kinerja mencapai target (ISTIMEWA) serta kinerja anggaran sangat baik, sejumlah SDM Set.Itjen juga diperbantukan dalam pengawalan pengawasan Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Penggunaan sarana dan prasarana Set.Itjen tidak lepas dari penerapan good governance dalam tata kelola BMN. Set.Itjen telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif, hal tersebut didukung dengan peningkatan kualitas SDM yang telah memahami sistem pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif.

Selama tahun 2023, dilakukan penggunaan BMN terdiri dari peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tak berwujud dengan juga dilakukan pengamanan aset yang terdaftar di Set.Itjen.

Dalam mengelola BMN, Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau dikenal dengan IPA digunakan sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan BMN pada seluruh K/L termasuk Kemenlu dan beserta unit kerja di bawahnya, yang telah dimulai pengukurannya sejak tahun 2021. Implementasi IPA merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN.

Mengingat Kemenlu memperoleh nilai IPA sebesar 2,91 (nilai merupakan nilai perolehan tahun 2022 mengingat nilai 2023 belum diterbitkan oleh Kemenkeu). Dengan telah diimplementasikannya Indeks Pengelolaan Aset sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN Kemenlu (capaian tertuang pada Bab III “IKU Nilai Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu”), maka hasil yang diperoleh menjadi bahan monitoring dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata kelola BMN serta sebagai upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan.

Kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada seluruh Program dan Sasaran Strategis selama tahun 2023, sehingga target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan ketersediaan anggaran, SDM dan sarana dan prasaran yang ada di Set.Itjen.

---00---



Penutup

Uraian simpulan umum atas capaian kinerja Set.ljten TA 2023 dan pemanfaatan kinerja yang dilengkapi dengan uraian kendala utama yang dihadapi, langkah solutif dan proyeksi di masa mendatang untuk meningkatkan prestasi kinerja

BAB V Penutup

Pelaksanaan tugas dan fungsi Set.Itjen Tahun 2023 merujuk pada dokumen perencanaan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023 dan RKA- KL 2023. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Set.Itjen diukur melalui 9 IKU pada 7 sasaran strategis adalah sebesar 103,26. Sementara itu realisasi anggaran di tahun 2023 mencapai _____ dari alokasi pagu akhir anggaran _____ atau sebesar 100%.

NCKO Set.Itjen di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,25 poin dari tahun 2021 yang mencapai sebesar 104,51. Meskipun demikian, realisasi kinerja Set.Itjen secara keseluruhan cenderung meningkat mengingat NCKO Set.Itjen tahun 2023 adalah pembagian dari realisasi kinerja dengan target kinerja yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya (2022). Sementara realisasi anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya (2022) yang tercatat sebesar 99,99%.

Keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam merealisasikan target kinerja di atas 100% atau istimewa yang ditetapkan dalam PK tahun 2023, serta realisasi anggaran hingga sebesar 100%, merupakan dampak positif dari evaluasi internal yang terus dilakukan dalam perbaikan pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sejumlah upaya signifikan di tahun 2023 yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut adalah inisiasi untuk meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Itjen selaku APIP Kemenlu, serta peningkatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui sejumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai, sehingga terdapat kepedulian pegawai dan tentunya keterlibatan pimpinan untuk memastikan tercapainya target kinerja.

Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Set.Itjen telah melaksanakan penyusunan perencanaan kinerja beserta monitoring dan evaluasi kinerja, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, kegiatan Tim Penilai Internal Peta Jalan Reformasi Birokrasi, pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, peningkatan kapabilitas APIP, penyempurnaan survei persepsi kepuasan layanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, pengembangan layanan konsultasi berbasis web, dan tugas lain sesuai instruksi pimpinan.

Meskipun pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilakukan di tahun 2023 telah berjalan sangat baik, namun sejumlah kendala masih dihadapkan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini terutama terkait dengan keterbatasan jumlah SDM dan alokasi anggaran yang cukup terbatas, sehingga belum dapat memberikan dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam kaitan ini pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilakukan secara maksimal, termasuk pelaksanaan fasilitasi untuk pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Selain itu dengan terjadinya perampingan jabatan struktural pada OTK Kemenlu berdasarkan Permenlu 6/2021, perlu upaya untuk memperkuat jumlah dan kapasitas SDM yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peta jabatan yang baru.

Terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi, Sekretariat Inspektorat Jenderal akan terus melakukan upaya penguatan organisasi dan pengelolaan kinerja dan anggaran. Selain itu koordinasi dengan pihak terkait akan dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah ketersediaan sumber daya, baik SDM dan anggaran, termasuk dengan terus memperkuat penerapan TIK dalam mendukung tugas pengawasan yang ada saat ini dan tuntutan pelaksanaan tugas ke depan.

---000---

LAMPIRAN

(tersedia di buku II)



---000---